WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai antara asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan terjadinya pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu diubah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Asisten Setda

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Ass. Perekonomian	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

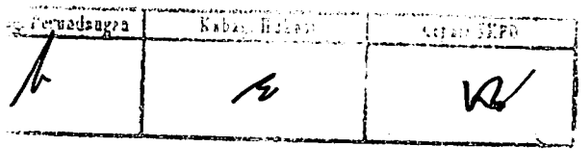

14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023.

Pasal I

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 95) di sisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmaisin Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023.

(3) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) bagian utama, yaitu:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendapatan Daerah;
f. BAB VI Penutup.

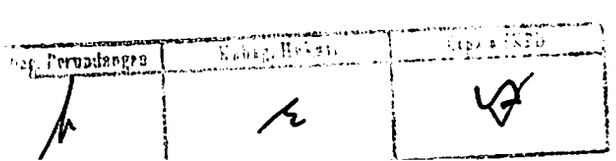

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 89

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala OPD

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara garis besar mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu duapuluh (20) tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima (5) tahun (RPJMD), serta rencana pembangunan jangka pendek dengan kurun waktu satu (1) tahun atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen resmi rencana daerah, mempunyai kedudukan yang strategis karena merupakan dokumen yang menjembatani antara dari perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut memuat isu strategis, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 adalah dari hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan yang luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, Penambahan atau Pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.1.3 Historis

Kota Banjarmasin merupakan kota mayoritas penduduknya bergerak di bidang jasa dan perdagangan sehingga tempat usaha merupakan syarat mutlak pergerakan perekonomian daerah. Sebagai kota yang dikenal dengan Kota Seribu Sungai maka sungai harus menjadi basis utama dalam menciptakan Banjarmasin sebagai kota yang bertakwa, aman, indah, maju, amanah dan nyaman. Keinginan tersebut diwujudkan dengan dasar pengembangan budaya lokal berbasis sungai yang secara tradisonal telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Sungai dipandang sebagai pangkal tolak bagaimana Kota Banjarmasin akan dikembangkan di masa datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2022 ini adalah :

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Salinan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.811M.PPN/HK/08/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang (Kota Banjarmasin

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tahun 2006-2021) (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin No 4 tahun 2016 tentang perubahan atas atas peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 No 17); dan
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026) (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 67));

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan RKPD Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah dokumen perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dimana diharapkan dalam penyusunan RKPD Perubahan agar masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsinya terpola pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembanguan daerah secara terarah dan terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dan Hasil dari RKPD Perubahan yang ditetapkan adalah merupakan masukan berbagai analisa data dari kondisi tertentu dengan semua Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran tentang Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Prioritas Pembangunan, serta Program PD yang memuat kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran.

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

1.3.2 Tujuan Penyusunan RKPD

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah untuk menjamin kelangsungan, arah serta kesinambungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat tentang Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih serta program prioritas dari pemerintah pusat dan provinsi. Isi dari RKPD Perubahan ini memuat Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kerangka Regulasi dan Kerangka Anggaran serta menjadi acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah (PD) dalam menyusun perubahan KUPA dan PPAS-P Tahun 2023.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN triwulan I TAHUN 2023

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan triwulan I Tahun 2023.

BAB III. KERANGKA PERUBAHAN EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Memuat tentang Program Prioritas Daerah Perubahan (Semester Kedua) Tahun 2023 serta pendanaan untuk rencana kerja perubahan perprogram kegiatan.

Memuat kerangka ekonomi daerah melalui perkembangan dari perekonomian Nasional, Provinsi dan Daerah serta kebijakan perekonomian yang diambil Pemerintah Kota Banjarmasin. Disamping itu memuat pula perkiraan pendanaan yang digunakan untuk pembangunan daerah di tahun 2023.

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

BAB IV. RENCANA SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2023, pergeseran kegiatan antara perangkat daerah, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif, Penambahan Atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Recana Program dan Kegiatan harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari RKPD Perubahan yang juga memuat kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan berkaitan dengan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN triwulan I TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai triwulan II Tahun 2023

RKPD merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama setahun, yang di implementasikan dalam Perubahan RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai triwulan I tahun berjalan. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
2. Kegiatan baru/alternatif yang harus di tampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023. dan/atau;
3. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya.

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi targetkinerja, lokasi dan perangkat daerah penanggung jawab, capaian saat ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
			TRIWULAN II	
1	2	3	4	
			Kinerja (K)	Realisasi Keuangan (Rp.)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB		
1	1 01	PENDIDIKAN		
		DINAS PENDIDIKAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN		47,00	13,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	1	URUSAN PEMERINTAHAN		
2	1 02	KESEHATAN		
		DINAS KESEHATAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN		76,00	22,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Tinggi**	**Sangat Rendah**
	1	URUSAN PEMERINTAHAN		
3	1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN		35,00	40,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	1	URUSAN PEMERINTAHAN		
4	1 04	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN		27,00	12,00

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
							TRIWULAN II	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	1					URUSAN PEMERINTAHAN		
5	1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						67,00	51,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sedang**	**Sangat Rendah**
	1					URUSAN PEMERINTAHAN		
6	1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						16,00	7,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	1					URUSAN PEMERINTAHAN		
7	1	05				KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						87,00	44,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Tinggi**	**Sangat Rendah**
	1					URUSAN PEMERINTAHAN		
8	1	06				SOSIAL		
						DINAS SOSIAL		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						39,00	25,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
9	2	07				KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA		
						DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						32,00	33,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		

Kasubbag. Perwadangan	Kabag. Hukum	

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
							TRIWULAN II	
10	2	08				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						42,00	31,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
11	2	09				PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
						DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						31,00	16,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
12	2	11				LINGKUNGAN HIDUP		
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						41,00	28,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
13	2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						54,00	28,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
14	2	14				PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						56,00	23,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
15	2	15				PERHUBUNGAN		

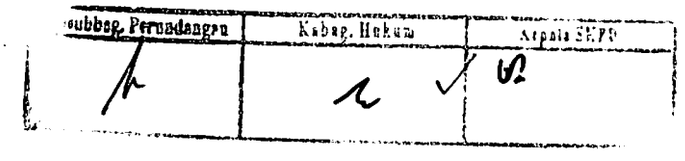

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
							TRIWULAN II	
						DINAS PERHUBUNGAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						31,00	23,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
16	2	16				KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						52,00	31,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
17	2	18				PENANAMAN MODAL		
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						16,00	10,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
18	2	19				KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
						DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						36,00	25,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2					URUSAN PEMERINTAHAN		
19	2	23				PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						76,00	14,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Tinggi**	**Sangat Rendah**
	3					URUSAN PEMERINTAHAN		
20	3	30				PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN						29,00	35,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**Sangat**	**Sangat**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

No	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
						TRIWULAN II	
						Rendah	Rendah
	4				URUSAN PEMERINTAHAN		
21	4	01			SEKRETARIAT DAERAH		
					SEKRETARIAT DAERAH		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					28,00	29,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Rendah	Sangat Rendah
	4				URUSAN PEMERINTAHAN		
22	4	02			SEKRETARIAT DPRD		
					SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					19,00	13,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Rendah	Sangat Rendah
	5				URUSAN PEMERINTAHAN		
23	5	01			PERENCANAAN DAN PENELITIAN		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					12,00	28,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Rendah	Sangat Rendah
	5				URUSAN PEMERINTAHAN		
24	5	02			KEUANGAN		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					22,00	26,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Rendah	Sangat Rendah
	5				URUSAN PEMERINTAHAN		
25	5	03			KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					45,00	19,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Rendah	Sangat Rendah
	6				URUSAN PEMERINTAHAN		
26	6	01			INSPEKTORAT		
					INSPEKTORAT		

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

No	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
						TRIWULAN II	
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					61,00	30,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Rendah**	**Sangat Rendah**
	7				URUSAN PEMERINTAHAN		
27	7	01			KECAMATAN		
					KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					18,00	20,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	7				URUSAN PEMERINTAHAN		
28	7	01			KECAMATAN		
					KECAMATAN BANJARMASIN UTARA		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					34,00	26,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	7				URUSAN PEMERINTAHAN		
29	7	01			KECAMATAN		
					KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					39,00	32,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	7				URUSAN PEMERINTAHAN		
30	7	01			KECAMATAN		
					KECAMATAN BANJARMASIN BARAT		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					24,00	18,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	7				URUSAN PEMERINTAHAN		
31	7	01			KECAMATAN		
					KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					34,00	26,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	8				URUSAN PEMERINTAHAN		
32	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN					26,00	11,00

Kasubbag. Perwadangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (%)	
			TRIWULAN II	
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah

Evaluasi Hasil RKPD memuat informasi mengenai kesesuaian program dan kegiatan prioritas pada dokumen perencanaan dari RPJMD sampai dengan RKPD dan capaian kinerja dan realisasi penganggaran pada triwulan II Tahun 2023 Perencanaan Tahun 2023 merupakan tahun pertama penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga terdapat penyesuaian dokumen perencanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan tabel evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dirata-ratakan realisai kinerja rendah hal itu disebabkan beberapa hal dijabarkan sebagaimana berikut:

2.1.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan pendidikan hanya sebesar 47% sedangkan untuk realisasi anggarannya hanya sebesar 13 % yang mana keduanya termasuk dalam predikat sangat rendah. Hal ini berdampak pada beberapa indikator yang tidak tercapai targetnya. Adapun penyebab dari tidak tercapainya kinerja urusan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan rendahnya partisipasi masyarakat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti pendidikan non formal paket A, B, dan C
3. Kualitas dan kualifikasi pendidik yang belum memenuhi syarat

2.1.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan kesehatan sebesar 76% yang masuk dalam predikat tinggi sedangkan untuk realisasi

anggarannya hanya sebesar 22% yang termasuk dalam katagori sangat rendah.

2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 35% sedangkan untuk realisasi keuangannya hanya sebesar 40% hal ini menunjukkan bahwa predikat dari seluruh program untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sangat rendah. Berdasarkan hal tersbut maka disampaikan hal yang menjadi penyebab rendahnya realisasi kinerja dan anggaran adalah pelaksanaan kegiatan dan pengerjaan yang masih berlangsung.

Tabel 2.2

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS MADYA**			**88.38 %**
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				99.19 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.66 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*168,03*	*167,322*	708	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.52 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	97.61 %
		(1)	(2)	(3)	
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	60	60	0	100.00 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	99	99	0	100.00 %

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Jaringan perpipaan	168,03	151,983	16,047	90.45 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	168,19	152,143	16,047	390.45 %
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				77.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	61.42 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1,154*	*886*	268	77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.16 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	80.81 %
		(1)	(2)	(3)	
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1,154	886	268	76.78 %
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	1,154	886	268	76.78 %
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	1,154	886	268	76.78 %
	4 . Sub-sistem pengangkutan	11	6	5	54.55 %
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	127	127	0	100.00 %
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	127	127	0	100.00 %
	JUMLAH	3,727	2,918	809	484.89 %

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman hanya mencapai 51% dan untuk realisasi anggarannya hanya 59% hal ini menunjukan bahwa realisasi kinerja untuk urusan

Kabag. Perwadangpu | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

perumahan dan kawasan permukiman termasuk dalam katagori sangat rendah. Adapun hal yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah adanya keterbatasan anggaran. Khususnya pada pencapaian indikator persentase rumah layak huni pada program kawasan permukiman yang ditargetkan sebesar 97,46% pada tahun 2023.

Tabel 2.3

Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
		Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1*	*1*	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		(1)	(2)	(3)	
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	4 . Pembangunan baru di lokasi	1	1	0	100.00 %

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	baru/relokasi bagi korban bencana.				
	JUMLAH	4	4	0	400.00 %
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1*	*1*	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
		(1)	(2)	(3)	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	20	20	0	100.00 %
	2 . Subsidi uang sewa	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00 %
	JUMLAH	22	22	0	300.00 %

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

2.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Banjarmasin di ampu oleh 3 (tiga) SKPD yakni, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Pamong Praja Kota Banjarmasin adalah 67% dan capaian realisasi keuangannya 51%. Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk realisasi kinerjanya sebesar 27,98% dan realisasi keuangannya sebesar 13,25% yang masuk dalam katagori sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja ini khususnya pada indikator Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang ditargetkan sebesar 100% hanya tercapai sebesar 23,12%, diketahui faktor penghambat pencapaian indikator kinerja ini diantaranya : Masih Kurangnya SDM Tim Reaksi Cepat/ Pusdalops yang terlatih/bersertifikat Nasional; Sarpras/Peralatan yang masih kurang lengkap dan berusia tua; Belum tersedianya SOP/Regulasi Penanggulangan Bencana, dan; Anggaran yang kurang mencukupi. Sedangkan untuk realisasi kinerja dan anggaran triwulan II Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 87% dan 44%. Untuk realisasi kinerjanya sudah masuk dalam predikat sangat tinggi.

2.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan sosial adalah sebesar 39% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 25%. Adapun indikator yang capaiannya sangat rendah sampai dengan triwulan II adalah indikator Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar. Rendahnya capaian indikator ini di pengaruhi oleh kurangnya validasi akurasi data terpilah terhadap PPKS sehingga menyulitkan sebaran rehabilitasi sosial dasar. Sebagai tindak lanjut yang diperlukan oleh dinas sosial adalah memfokuskan penggalian data di lapangan terutama yang menjadi target SPM urusan sosial.

2.1.7 Urusan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebesar 32% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 33%. Dari 91 indikator kinerja urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah ada 28 indikator yang baru dapat terlaksana sampai dengan triwulan II tahun 2023 ini.

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan Persentase Penyerapam Tenaga Kerja di Sektor Formal yang merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, tercatat sampai pada triwulan II tahun 2023 ini hanya tercapai sebesar 4,1% sedangkan untuk target yang disepakati di tahun 2023 adalah 8,2%.

2.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar 42% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 31%.Rendahnya capaian triwulan II untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; Kantor UPTD PPA belum melikiki sarana dan prasarana yang berlum memeadai, keterbatasan SDM lembaga penyedia layanan pengaduan, dan penempatan SDM kurang sesuai dengan keahliannya.

2.1.9 Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 31% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 16%. Dari 108 indikator kinerja untuk urusan ketahanan pangan pertanian kelautan dan perikanan ada 31 indikator kinerja yang terlaksana. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin sebagai pengampu urusan ini adalah ketidakpastian iklim dan cuaca sehingga untuk beberapa indikator Pertumbuhan produksi produk olahan hasil perikanan tidak dapat tercapai di triwulan II ini, dari yang ditargetkan 4% hanya tercapai 2%.

2.1.10 Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar 41% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 28%. Dari 202 indikator hanya 47 indikator yang dapat terisi capaiannya.

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Adapun hambatan yang di alami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian indikator kinerja diantaranya; Kurangnya RTH; Peningkatan pencemaran lingkungan hidup dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat sehingga penanganannya belum optimal; belum adanya apresiasi yang layak bagi penggerak kelestarian lingkungan hidup; dan belum terakreditasinya laboratorium lingkungan hidup yang dimiliki.

2.1.11 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 54% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 28%. Dari 56 indikator hanya 33 indikator yang dapat terisi capaiannya.

2.1.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 56% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 23%. Dari 106 indikator hanya 42 indikator yang dapat terisi capaiannya. Adapun yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, penduduk dan keluarga berencana diantaranya; Koordinasi lintas sektor yang masih kurang, Dukungan anggaran yang kurang, dan Masih kurangnya sosialisasi.

2.1.13 Urusan Perhubungan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Perhubungan adalah sebesar 31% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 23%. Dari 41 indikator hanya 27 indikator yang dapat terisi capaiannya. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kurangnya Alat Pemantauan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

2.1.14 Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebesar 52% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 31%. Dari 88 indikator ada 64 indikator yang terisi capaiannya. Salah satu indikator yang masih rendah capaiannya adalah indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota. Pada tahun 2023 di targetkan sebesar 100% dan pada triwulan II baru tercapai sebesar 50%. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak dalam rangka penyebaran informasi pemerintah daerah.

2.1.15 Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Penanaman Modal adalah sebesar 16% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 10%. Dari 25 indikator hanya 8 indikator yang dapat terisi capaiannya. Adapun salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Nilai investasi penanaman modal yang baru tercapai sebanyak Rp 570.313.140.000 dari yang ditargetkan sebesar Rp 1,154 triliun.

2.1.16 Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebesar 36% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 25%. Dari 190 indikator ada 75 indikator yang terisi capaiannya sampai dengan triwulan II 2023. Rencahnya capaian ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya.

2.1.17 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar 76% sedangkan realisasi anggarannya adalah

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

sebesar 14%. Dari 50 indikator ada 38 indikator yang terisi capaiannya sampai dengan triwulan II 2023. Capaian urusan perpustakaan dan kearsipan masuk dalam predikat tinggi yang mana paling inggi dari pada capaian kinerja di urusan lainnya.

2.1.18 Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Perdagangan dan Perindustrian adalah sebesar 29% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 35%. Dari 77 indikator hanya 19 indikator yang dapat terisi capaiannya pada triwulan II tahun 2023. Capaian kinerja prioritas RKPD 2023 dari urusan perdagangan dan perindustrian dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Capaian Indikator Prioritas Urusan Perdagangan Dan Perindustrian

Program	Indikator	Target	Capaian	SKPD	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut yang diperlukan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola dengan profesional (%)	12,5	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Keterbatasan sumberdaya finansial sering menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan	- Melakukan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang PD Pasar Baiman untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 27 tentang BUMD - Melakukan revitalisasi pasar tradisional milik Pemerintah Kota Banjarmasin
	Persentase toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan gudang yang dikelola dengan profesional (%)	32,2	6,707	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Regulasi yang tidak jelas atau berubah-ubah dapat menjadi penghambat bagi investasi dalam infrastruktur perdagangan	Melaksanakan monitoring pada toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan gudang yang berada di Wilayah Kota Banjarmasin

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Program	Indikator	Target	Capaian	SKPD	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut yang diperlukan
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas Kota Banjarmasin (%)	1,00	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	- Persaingan yang kuat dengan negara lain dalam pasar internasional - Keterbatasan infrastruktur dan logistik menyebabkan peningkatan biaya dan waktu pengiriman barang	Melaksanakan pelatihan ekspor untuk pelaku usaha ekspor di wilayah Kota Banjarmasin
Program Penggunaan dan Pemasaraan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri (%)	2,00	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persaingan dari produk impor atau produk dari merek asing dapat menjadi penghambat penjualan produk dalam negeri	Melaksanakan promosi dagang dengan mengikuti pameran baik di dalam daerah maupun luar daerah
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (%)	2,22	0	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persaingan dengan perusahaan besar atau industri yang mapan	Melaksanakan pelatihan penumbuhan Industri Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kemampuan produksi IKM
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan ketersediaan data dan informasi industri secara lengkap dan terkini di tingkat kota berbasis elektronik (%)	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengumpulan data industri yang lengkap dan terkini bisa menjadi tantangan	Melakukan pengumpulan data industri secara door to door ke pelaku Industri Kecil Menengah

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Program	Indikator	Target	Capaian	SKPD	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut yang diperlukan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	14	6,06	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	- Kenaikan Biaya Produksi dapat menjadi pemicu kenaikan harga barang pokok dan barang penting - Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga barang impor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar domestik	- Melaksanakan pemantauan ahrga barang pokok di pasar tradisional - Melaksanakan kegiatan pasar murah untuk mengintervensi kenaikan harga barang kebutuhan pokok
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	100	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	- Masih kurangnya kesadaran para pemilik UTTP dalam hal kewajibannya untuk menera/menera ulangkan UTTP yang mereka miliki - Keterbatasan personil dan anggaran untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang khususnya di pasar tradisional	Melaksanakan kegiatan pengawasan BDKT dan melakukan tera/tera ulang

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

2.1.19 Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Sekretariat Daerah adalah sebesar 28% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 29%. Dari 415 indikator hanya 62 indikator yang dapat terisi capaiannya.

2.1.20 Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Sekretariat DPRD adalah sebesar 19% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 13%. Dari 36 indikator hanya 15 indikator yang dapat terisi capaiannya.

2.1.21 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 12% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 28%. Dari 166 indikator hanya 15 indikator yang dapat terisi capaiannya.

2.1.22 Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Keuangan adalah sebesar 22% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 26%. Dari 67 indikator hanya 32 indikator yang dapat terisi capaiannya. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kinerja BPKPAD diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Penurunan Pendapatan Asli Daerah
b) Perubahan Kebijakan Pusat
c) Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat
d) Krisis Keuangan dan Utang Daerah
e) Ketergantungan pada Sumber Pendapatan Tertentu
f) Korupsi dan Penyalahgunaan Keuangan Daerah
g) Kebijakan Pengeluaran yang Tidak Efisien
h) Kurangnya Investasi atau Potensi Pendapatan Alternatif

2.1.23 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar 45% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 19%. Dari 31 indikator hanya 16 indikator yang dapat terisi capaiannya. Adapun yang menjadi hambatan untuk pencapaian indikator kinerja diantaranya adalah Pengembangan Karier, Perlindungan dan Pelayanan, serta Sistem informasi walaupun sudah ada Peraturan Walikota namun masih dalam tahap pengembangan.

2.1.24 Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Inspektorat adalah sebesar 61% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 30%. Dari 40 indikator hanya 10 indikator yang dapat terisi capaiannya. Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya indikator kinerja inspekorat diantaranya adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga sampai trwulan II 2023 hanya tercapai sebanyak 82,17%.

2.1.25 Kecamatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja dan keuangannya seluruh program dan kegiatan urusan Kecamatan dapat yaitu sebagai berkut :

a) Banjarmasin Timur realisasi kinerja adalah sebesar 18% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 20%;

b) Banjarmasin Utara realisasi kinerja adalah sebesar 34% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 26%;

c) Banjarmasin Tengah realisasi kinerja adalah sebesar 39% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 32%;

d) Banjarmasin Barat realisasi kinerja adalah sebesar 24% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 18%;

e) Banjarmasin Selatan realisasi kinerja adalah sebesar 34% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 26%.

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

2.1.26 Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II rata-rata capaian realisasi kinerja seluruh program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar 26% sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar 11%. Dari 90 indikator kinerja hanya 25 indikator yang dapat terisi capaiannya.

2.2 Permasalahan Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2023

Belum optimalnya pelaksanaan dan pemerataan pembangunan di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari koefisien gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna), ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya dinikmati oleh Sebagian golongan masyarakat yakni golongan masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Indeks gini Kota Banjarmasin tahun 2020 yaitu 0.34 dan di tahun 2021 naik menjadi 0.35 Sedangkan target tahun 2022 Indeks Gini Kota Banjarmasin turun menjadi 0,32. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat secara horisontal di Kota Banjarmasin dapat mengalami penurunan dan dapat dikatakan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Banjarmasin semakin membaik dan masuk dalam kategori ketimpangan wajar. Namun jika dibandingkan dengan nilai rasio gini dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin masih menduduki urutan ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah. beberapa permasalahan pokok pembangunan Kota Banjarmasin di tahun 2023. antara lain sebagai berikut :

1. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat

   Kondisi terakhir di tahun 2022 Kemiskinan 4,74% turun sebesar -0,15% dari 4,89 % di Tahun 2021, TPT Kota Banjarmasin 6,96% naik lebih tinggi dari TPT Kalsel 4,74% dan Nasional 5,86%. Naiknya harga BBM (Minyak dan Gas) berdampak pada naiknya Harga Gas dan Listrik, danbeberapa waktu terakhir naiknya harga minyak goreng yang memicu naiknya harga kebutuhan pokok

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

lainnya, menggerus kenaikan pendapatan masyarakat, terutama Jumlah penduduk Kota Banjarmasin masuk dalam golongan rawan miskin(vulnerable) yaitu pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional maupun global yang sedang lesu karena pandemi Covid-19, di samping itu, kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin sehingga penduduk yang dikategorikan miskin bertambah. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Kota Banjarmasin juga mengalami penurunan dari 34.839 jiwa pada tahun 2021 menjadi sebanyak 34.009 jiwa pada tahun 2022.

2. Sumber Daya Manusia yang belum berdaya saing

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia yang belum berdaya saing, maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Capaian pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian indikator indeks pembangunan manusia. Capaian pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian indikator indeks pembangunan manusia. IPM di Kota Banjarmasin tahun 2017-2022 mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2022 sudah mencapai 77,97 meskipun begitu, angka IPM tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 72,91 selain itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten lain se-Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin berada pada peringkat ke-dua diatas Kota Banjarbaru (79,68).

Salah satu permasalahan pembagunan SDM di Provinsi Kalsel yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

dimana pada tahun 2022 hanya mencapai 10,21 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kota Banjarmasin hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 9. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

Indikator yang mempengaruhi IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dimana tahun 2022, AHH di Kota Banjarmasin berada pada usia (71,59). Angka tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki peluang hidup hingga usia 71,59 tahun. Meskipun mengalami peningkatan pelayanan kesehatan di setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup se-Kalimantan Selatan, berada pada urutan kedua setelah Banjarbaru (72,36) tahun. Permasalahan kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi di Banjarmasin.

Selain angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sebagai bentuk tindak lanjut dari sasaran prioritas RPJMN 2020-2024 pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan integerasi layanan penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. Kondisi penanganan AIDS di Kota Banjarmasin menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2021, terdapat 390 kasus HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, dengan angka kejadian baru sebanyak 42 kasus. Dalam upaya penanganan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan HIV/AIDS di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kota Banjarmasin. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap HIV/AIDS.

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Grafik 2.1

Jumlah Kasus HIV Pertahun

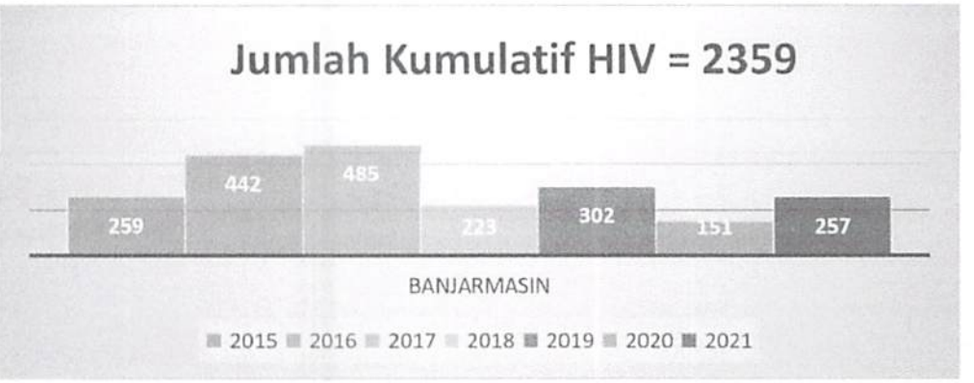

Sumber : SIHA Dinkes Kota Banjarmasin 2021

Pada tahun 2019 kasus HIV Kota Banjarmasin sebesar 302 Kasus dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 151 kasus dan tahun 2021 kasus meningkat menjadi 257 kasus.

Sedangkan kondisi Tuberkulosis, menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2021, terdapat 677 kasus TB di Kota Banjarmasin, dengan angka kejadian baru sebanyak 32 kasus. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga menyediakan pelayanan kesehatan dan pengobatan TB di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Kota Banjarmasin. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap TB.

Grafik 2.2

Data Suspect (SPM) dan Temuan Kasus TBC (CDR/TC)

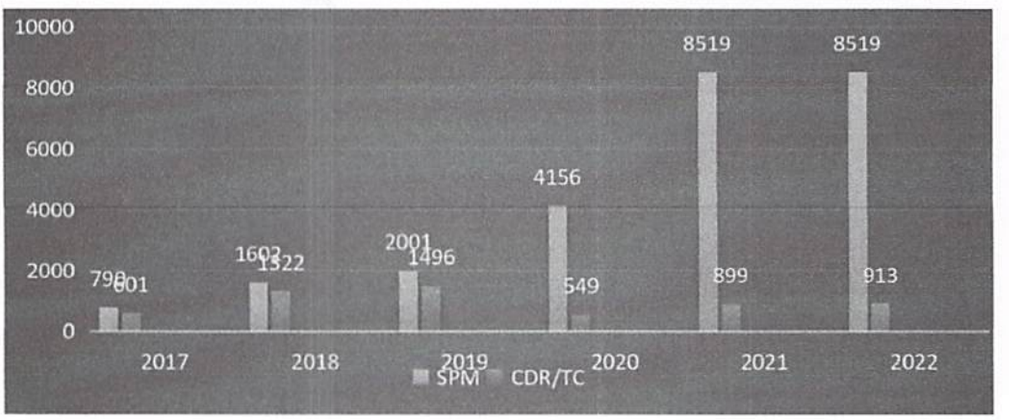

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Setiap tahun terjadi peningkatan angka target dan persen dari angka penemuan kasus TBC (Case detection rate) begitu juga dengan angka target Suspect TBC (SPM). Persentase capaian CDR dan SPM tertinggi di tahun 2019, terjadi penurunan di 2020 serta berangsur meningkat tapi tidak signifikan di 2021 dan 2022.

Grafik 2.3

Persentase capaian SUSP dan CDR TBC

Untuk kondisi Malaria, menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2021, terdapat 65 kasus malaria di Kota Banjarmasin, dengan angka kejadian baru sebanyak 6 kasus. Dalam upaya penanganan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah melakukan program sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap malaria. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan surveilans malaria secara rutin dan memantau kejadian wabah malaria di Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Grafik 2.4

Api /Annual Parasit insiden Kota Banjarmasin tahun 2010-2022

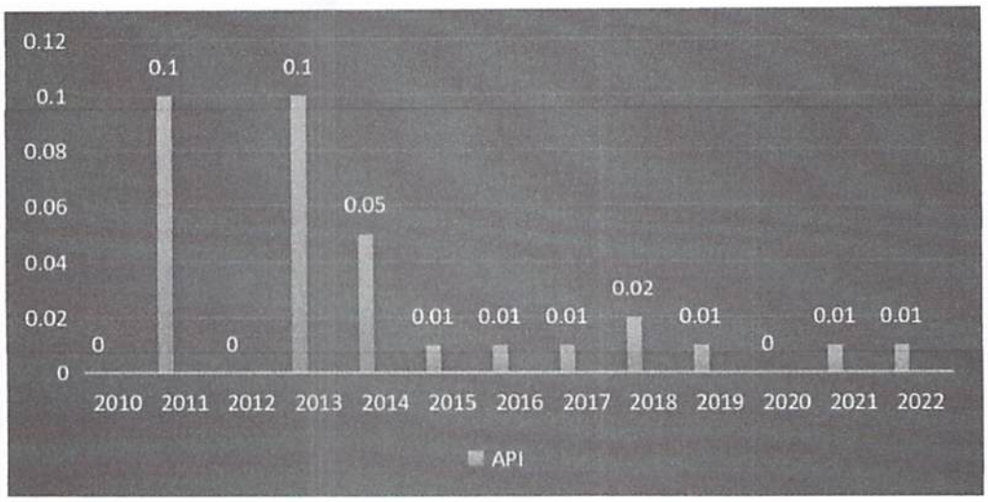

Pada Tahun 2019 kasus malaria kota Banjarmasin sebesar 4 kasus, tahun 2020 tidak ada kasus dan tahun 2021 sebesar 4 kasus, semua kasus malaria berasal dari kasus import atau kasus berasal dari luar wilayah kota Banjarmasin.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam mennghadapi tantangan kerja kedapan.Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Menyongsong Industri 4.0 menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang perlu diperhatikan. Salah satu indikasi rendahnya daya saing maupun kualitas tenaga kerja di Kota Banjarmasin adalah variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Di Kota Banjarmasin penduduk bekerja memiliki ijazah Sekolah Dasar mencapai 27,84%. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama mencapai 18,7%. Hanya 18,47% dari angkatan kerja yang bekerja yang mengantongi ijazah Perguruan tinggi.

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin cukup tinggi yakni mencapai 6,96% pada tahun 2022, menurun dibandingkan tahun 2021 di angka 8,47%. Meskipun begitu, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Banjarmasin menurun dari 63,19% menjadi 63,15% di tahun 2022.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Yang Belum Optimal.

Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik mengingat nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalsel masih berada di urutan terbawah se Kalimantan. Berdasarkan rilis dari Kementerian LHK, Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Banjarmasin pada tahun 2021 yaitu 57,06 terdiri dari komponen indeks kualitas air (IKA) 49.49, indeks kualitas udara (IKU) 82.84 dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) 22.38, Dalam perspektif IKLH, Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di pemerintah Kota Banjarmasin dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Beberapa potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup tersebut antara lain : industri kima, karet, plastik, makanan dan minuman,pengolahan kayu, pertanian, peternakan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dari penginapan dan rumah sakit,keterbatasan fasilitas buang air besar, dan timbunan sampah. Resultan dari upaya menjaga laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun ancaman bencana banjir akibat tingginya curah hujan, drainase yang tidak memadai dan perilaku masyarakat. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kota Banjarmasin tentunya tidak terlepas dari

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

penurunan kualitas dan kuantitas air sungai. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, beberapa sungai yang dilakukan pengamatan sebagaian besar terkategori sungai dengen pencemaran ringan, dan beberapa sungai tercemar sedang. Sepanjang tahun 2021 - 2022, Kota Banjarmasin telah mengalami beberapa kali banjir besar yang berdampak menimbulkan kerusakan infrastruktur,kerugian ekonomi dan kerugian sosial.

4. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiyaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan proyek-proyek strategis yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Di sisi lain Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam arti sempit, upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menutup defisit anggaran. Usaha yang dilakukan mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah hingga melalui sumber utang. Dalam arti luas pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBD saja, namun juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah seperti dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau melalui penggalian dana-dana CSR. Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Kota Banjarmasin masih tergantung transfer dari pusat.

Proporsi transfer Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah di Kota Banjarmasin masih cukup besar, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

pajak dan retribusi. Maka, langkah memperbesar kegiatan investasi dalam komposisi PDRB Kota Banjarmasin semakin diperlukan.

5. Belum Eektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika lima unsur pembangunan daerah dengan konsep pentahelik ABCGM yakni A Akademi (pendidikan), B Bisnis/dunia usaha (swasta), C Community (masyarakat),Goverment (Pemerintah) dan Media dapat berkolaborasi dengan baik. Kelima domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal. Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat,dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerahmemiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian berdasarkan pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah pada tahun 2019 masih berada pada posisi indeks RB sebesar 66,79. Tahun 2021 69,61 dan tahun 2022 diangka 68,59. Angka capaian ini sangat dipengaruhi oleh kinerja yang lainnya seperti SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, IPAK, IP ASN dan Indek Pelayanan Publik. Tantangan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah yaitu peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemda dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Pemerintah Daerah.

6. Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel ini terkesan mengejutkan, hal ini sebagaimana pernyataan masyarakat dan pemerintah daerah Kota Banjarmasin yang menanggapi dengan belum adanya pembahasan sebelumnya mengenai hal ini. Konteks ini diperkuat dengan belum ditemukannya mekanisme uji publik dengan mengudang kepala daerah masing-masing, demikian pula apabila RUU itu berkaitan daerah yang mana biasannya peran DPD sangat berpengaruh. Menurut Dr. Muhammad Pazri S.H, M.H, Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah Ayat :

Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Sehingga untuk mengambil keputusan pemindahan ibukota itu harus meliputi 3 landasan diantaranya landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Maka dari itu legislatif Provinsi, eksekutif Provinsi, legislatif kedua Provinsi harus dilibatkan dalam pembahasan UU Provinsi Kalimantan Selatan. Hanya saja dalam prosesnya tidak dirasa terlibat oleh DPRD Provinsi Kalsel dan DPRD Kota Banjarmasin, termasuk segenap komponen elemen masyarakat lainnya

Kasubbag. Perundang-undangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN APBD PERUBAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

Kondisi, sistem dan mekanisme suatu kegiatan perekonomian daerah merupakan faktor yang penting dari motor penggerak roda pembangunan daerah, namun guna mencapai keberhasilan pembangunan suatu daerah, faktor ekonomi tersebut bukanlah faktor yang independen karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu diantaranya faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Ketiga faktor tersebut mempunyai korelasi hubungan yang linear dan saling menunjang, dimana manakala suatu sistem perekonomian daerah hendak ditingkatkan faktor pendidikan dan kesehatan juga perlu ditingkatkan, karena tidak mungkin suatu perekonomian bisa ditingkatkan kalau Sumber Daya Manusianya (tingkat pendidikan dan kesehatan) masih rendah, begitu pula halnya kalau tingkat pendidikan dan kesehatan suatu masyarakat hendak ditingkatkan tentunya perlu mendapat dukungan ekonomi yang memadai. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah dukungan faktor infrastrukur daerah, baik infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya, serta faktor pelengkap lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam *life cycle* suatu sistem pembangunan daerah.

3.1 Kerangka Ekonomi Makro Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.

Dampak perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan akan mempengaruhi investasi seiring dengan ketatnya likuiditas global, sementara itu harga komoditas yang tinggi diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan tinggi pada ekspor dan pendapatan negara, meskipun terdapat risiko tekanan inflasi yang semakin tinggi di beberapa negara mitra dagang Indonesia.

Beberapa lembaga internasional merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia tahun 2022 sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini. Namun pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat di tahun 2023 dapat di lihat pada tabel proyeksi di bawah ini :

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara Dunia
Tahun 2022 dan 2023

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023								
	IMF (JAN 22)		WB		ADB (APR 22)		OE (APR 22)	
	2022	2023	2022 (APR 22)	2023 (JAN 22)	2022	2023	2022	2023
World	4,4	3,8	-	3,2	-	-	3,4	3,2
Major Economies	3,9	2,6	-	2,3	-	-	3,1	2,3
Amerika Serikat	4,0	2,6	-	2,6	3,9	2,3	3,1	2,0
Euro Area	3,9	2,5	-	2,1	3,3	2,6	2,9	2,7
Jepang	3,3	1,8	-	1,2	2,7	1,8	2,4	2,3
Emerging Markets	4,8	4,7	-	4,4	-	-	3,7	4,3
China	4,8	5,2	4,0 – 5,0	5,3	5,0	4,8	4,8	5,4
Indonesia	**5,6**	**6,0**	**4,6 – 5,1**	**5,1**	**5,0**	**5,2**	**5,7**	**5,7**
Vietnam	-	-	4,0 – 5,3	6,5	6,5	6,7	7,1	8,3
Thailand	4,1	4,7	2,6 – 2,9	4,3	3,0	4,5	4,8	6,4
Malaysia	5,7	5,7	4,8 – 5,5	4,5	6,0	5,4	6,1	6,4
Filipina	6,3	6,9	4,9 – 5,7	5,7	6,0	6,3	6,8	5,8
Brazil	0,3	1,6	-	2,7	-	-	0,9	1,4
India	9,0	7,1	-	6,8	7,5	8,0	7,3	5,8

Keterangan: Penurunan dari proyeksi periode sebelumnya
Peningkatan dari proyeksi periode sebelumnya

Sumber : RKP Tahun 2021

Dari tabel di atas PDB nasional pada -2,1 berdasarkan PDB pengeluaran, pada komponen konsumsi rumah tangga masih tertekan karena banyak terjadi pemberhentian pekerja sehingga terjadi penurunan pendapatan serta menurunnya daya beli masyarakat penyaluran Bantuan Sosial yang diharap mampu menahan laju Penurunan Konsumsi Rumah tangga belum optimal selanjutnya pada komponen Pemerintah mampu tumbuh positif didorong oleh realisasi belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa lainnya seiring akselarasi Program Pemulihan Ekonomi

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Nasional yang menjadi Fokus Pembanguan Nasional di Tahun 2020 selanjutnya pada komponen investasi,ekspor dan impor masih terkontraksi tajam.

Tahun 2022 di proyeksikan Inflasi negara berkembang diperkirakan akan meningkat, namun dalam batas yang moderat, dapat di lihat pada tabel proyeksi di bawah ini :

Gambar. 3.1
Proyeksi Inflasi di Beberapa Negara di Asia Tenggara
Tahun 2022 dan 2023

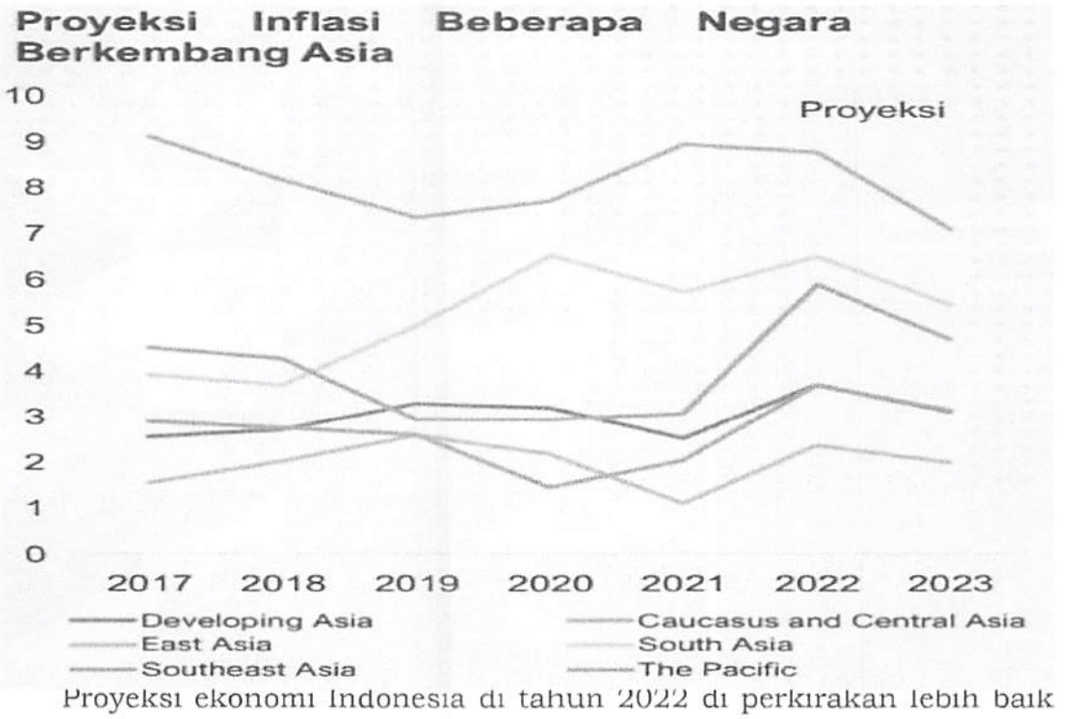

Proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2022 di perkirakan lebih baik dari tahun 2020 dan 2021 dimana hadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar dimana semua komponen PDB terkontraksi, selain itu tahun 2022 Pemerintah mulai melonggarkan beberapa regulasi terkait mobilisasi pergerakan manusia ini juga berdampak positif untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang selama pademi mati suri, dari sisi pengeluaran PDB sendiri tahun 2022 di perkirakan mencapai 5,2 - 5,5 dengan komposisi sisi pengeluaran dan produksi sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Gambar 3.2
Proyeksi PDB Indonesia Tahun 2022

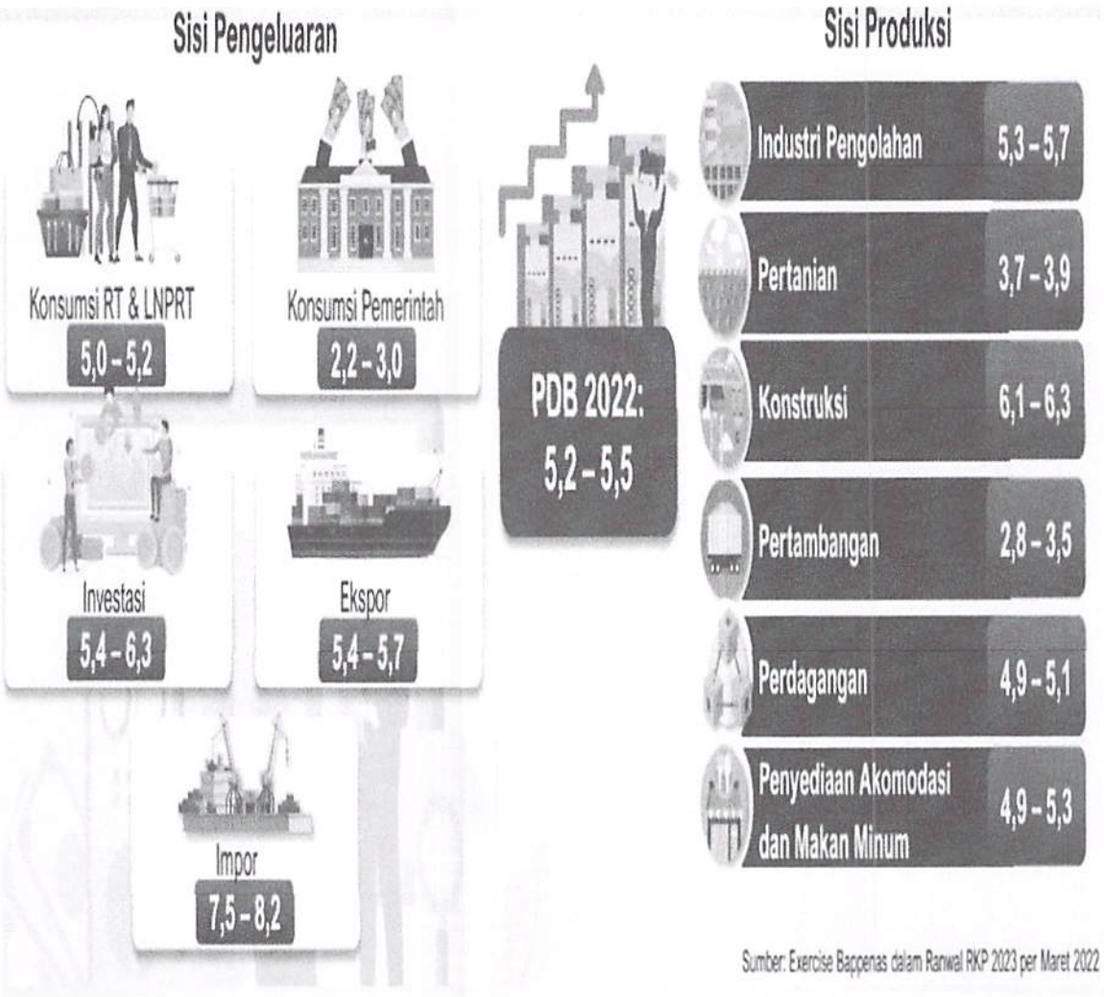

Dari sisi pengeluaran Pada PDB berdasarkan pengeluaran komponen Investasi,Ekspor dan Impor masih di harapkan menjadi kunci pemulihan mengingat investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi pengangguran pasca pandemic dan ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselarasi pertumbuhan ekonomi domestik, semtara dari sisi Produksi sektor kontruksi dan industri pengolahan di harapkan memberikan kotribusi besar terhadap PDB dimana pada sektor kontruksi sendiri berkaitan dengan rencana pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara IKN yang akan mulai dilaksanakan semester II Tahun 2022.

Fokus pembangunan Nasional pada Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 7 (tujuh Prioritas Nasional) dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3
Prioritas Nasional Tahun 2023

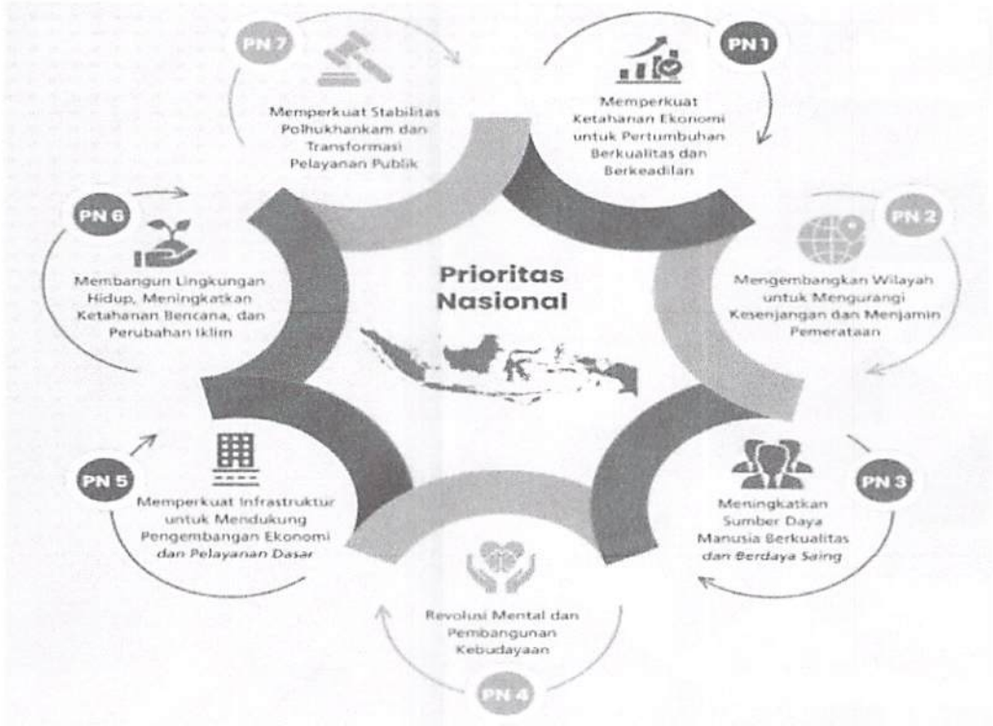

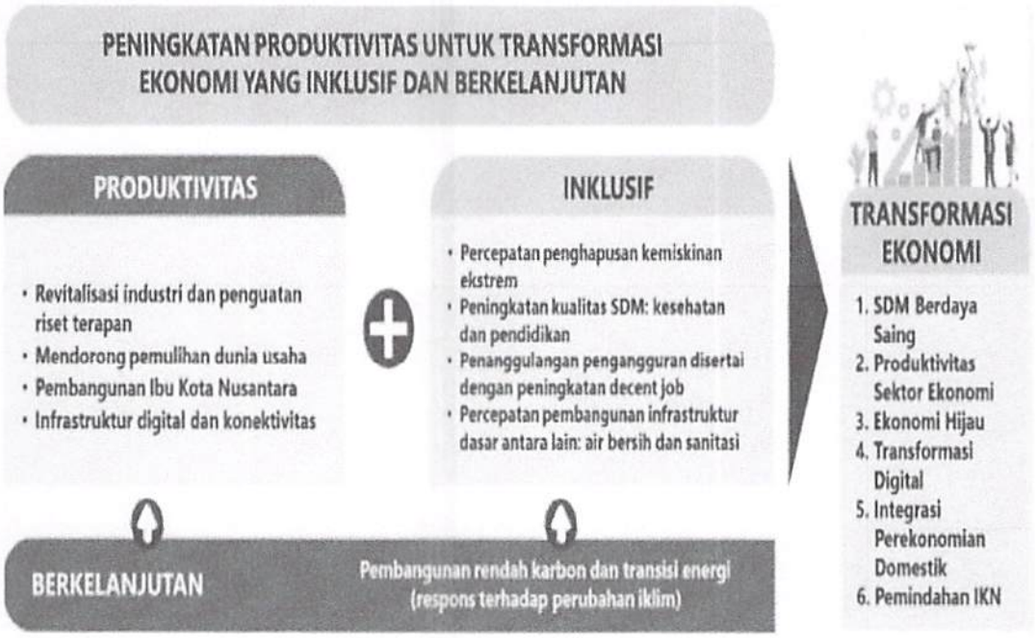

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak Covid-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2022 menjadi bagian penting perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 semua komponen terkontraksi, kecuali konsumsi pemerintah dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha, bersumber dari sektor-sektor utama. Di sisi pengeluaran sumber pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor impor, dan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat yang sempat menurun selama pandemi Covid-19 sudah menunjukaan perbaikan. Pada sisi penawaran (lapangan usaha), sumber pertumbuhan terbesar adalah di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor informasi dan komunikasi, dan dilanjutkan industri pengolahan, secara berurutan LPE tahun 2021 masing-masing sebesar 11,59%, 7,22%, dan 6,23%.

Grafik 3.1

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2021

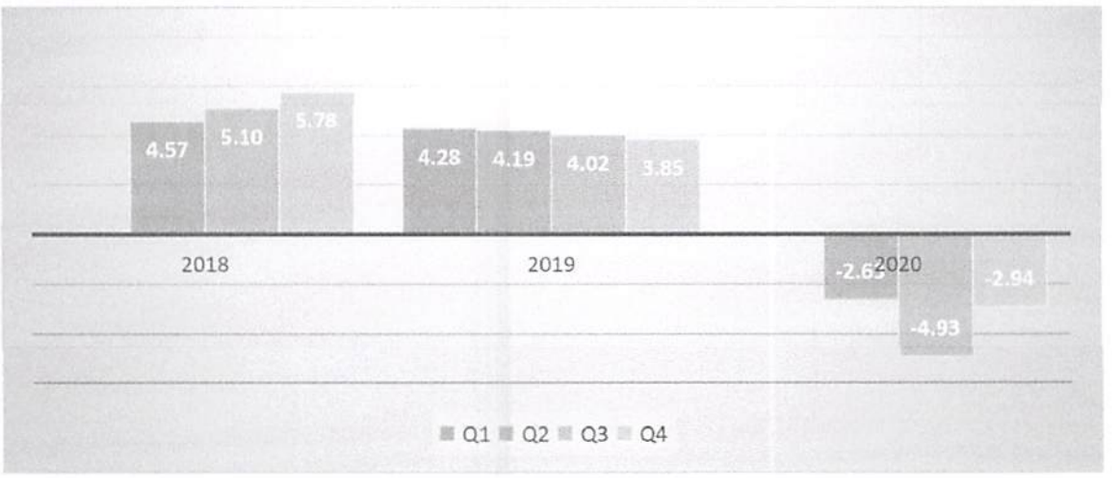

Sumber : BPS Kota Banjarmasin

PDRB Kalimantan Selatan masih di dominasi oleh kegiatan usaha yang bersifat ekstraksi yaitu pertambangan dan penggalian di ikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sedangkan industri pengolahan masih memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kalimantan Selatan, namun masih terbatas pada industri makanan dan minuman (67%), di butuhkan dorongan untuk pengembangan industri pengolahan pada sektor lainnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Gambar 3.2

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020

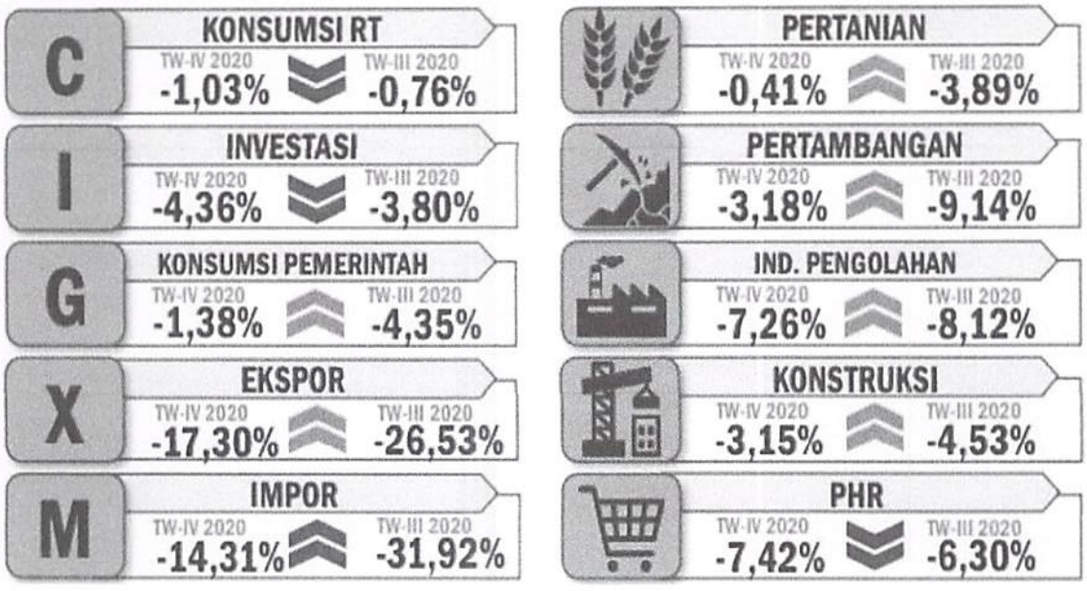

Sumber : BPS Kota Banjarmasin

Hampir setiap Kab/Kota di Kalimantan Selatan, sektor utamanya merupakan sektor yang mengalami kontraksi terbesar berdasarkan atas PDRB Kalimantan Selatan Tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa dampak penurunan ekonomi akibat Covid- 19 akan berdampak meratadi setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan beberapa Kabupaten dan Kotayang sektor utamanya adalah Pertambangan dan Transportasi, dampak kontraksi ekonominya akan terasa lebih dalam, Kontraksi terbesar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar -5,32%, pertambangan dan penggalian -4,47%, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor -3,38% dan industry pengolahan -3,38%.

Kerangka Ekonomi Kalimatan Selatan memproyeksikan Tahun 2021 menargetkan sebesar 1,3 - 1,5 dan tahun 2022 sebesar 4,3 - 4,5,dapat di lihat pada grafik di bawah ini ;

Kasubbag. Perdagangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Grafik 3.2

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 dan 2022

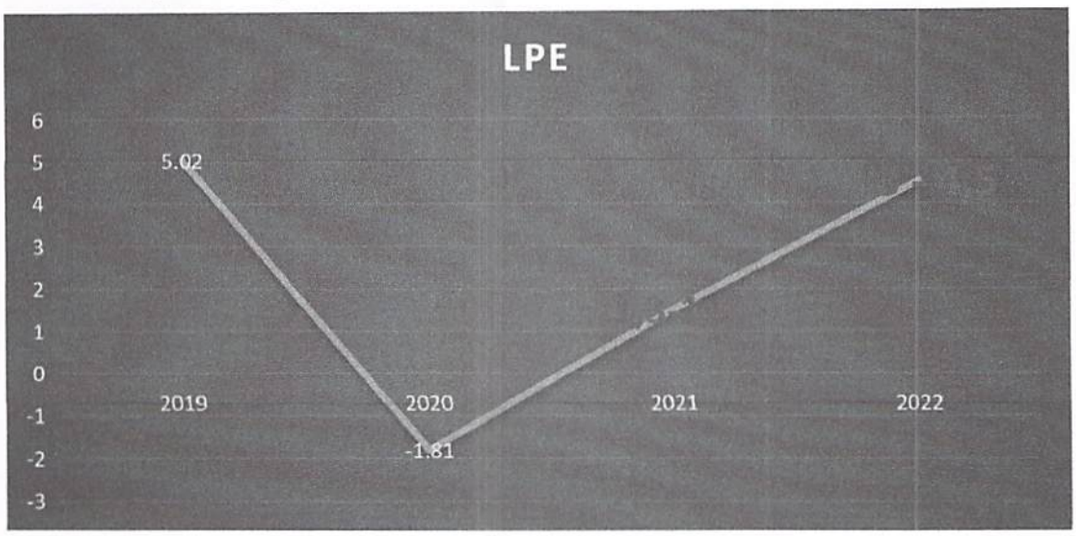

Sumber: BPS Kota Banjarmasin

Adapun tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah "Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan" tema ini ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diarahkan untuk membangun Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara, dan berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi yakni dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan (sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui) ke arah sekto sumber daya alam yang bisa diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan, dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Banjarmasin

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin pada dua tahun terakhir mengalami perlambatan. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin tumbuh sebesar 2,28 persen jika di bandingkan dari tahun 2020 sebesar -1,89, pertumbuhan ekonomi ini mungkin disebabkan penurunan produktivitas pada beberapa kategori lapangan usaha perekonomian di Kota Banjarmasin dimana hampir semua sektor tekontraksi dampak dari Covid-19, dan untuk tahun 2022 ekonomi Kota Banjarmasin sudah mulai bangkit naik menjadi 5,69 persen ini dampak positif mulai terkendalinya penyebaran pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah terkait kelonggaran mobilisasi

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

warga. Selanjutnya pada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin ditargetkan sebesar 4,00 sampai dengan 5,00 persen dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 5,00 sampai dengan 5,75 persen.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin

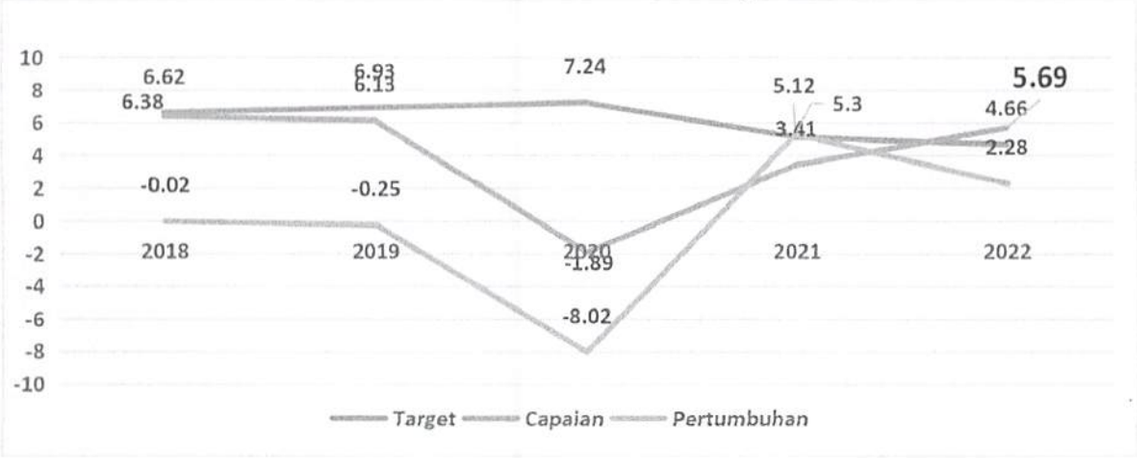

Sumber data : BPS Kota Banjarmasin, 2023

PDRB lapangan usaha dapat dijelaskan melalui 17 kategori lapangan usaha, pada tahun 2020 hampir semua sektor terkontraksi dampak dari pandemi Covid-19 sektor paling dalam terkontraksi industri pengolahan sebesar -6,18, Transportasi dan Pergudangan -6,33, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -5,42 dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -4,31 dan di Tahun 2021 dan 2022 semua sektor 17 kategori lapangan usaha mulai bangkit dan keluar dari posisi resisi terutama di sektor industri pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan 4 sektor tersebut merupakan unggulan dalam share PDRB untuk pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin pada tahun sebelumnya sehingga dampak terhadap perekonomian tentu saja merambat ke masalah lainnnya seperti meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.

Kasubbag. Perundang-u	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Grafik 3.4
PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga Konstan
Tahun 2021-2022

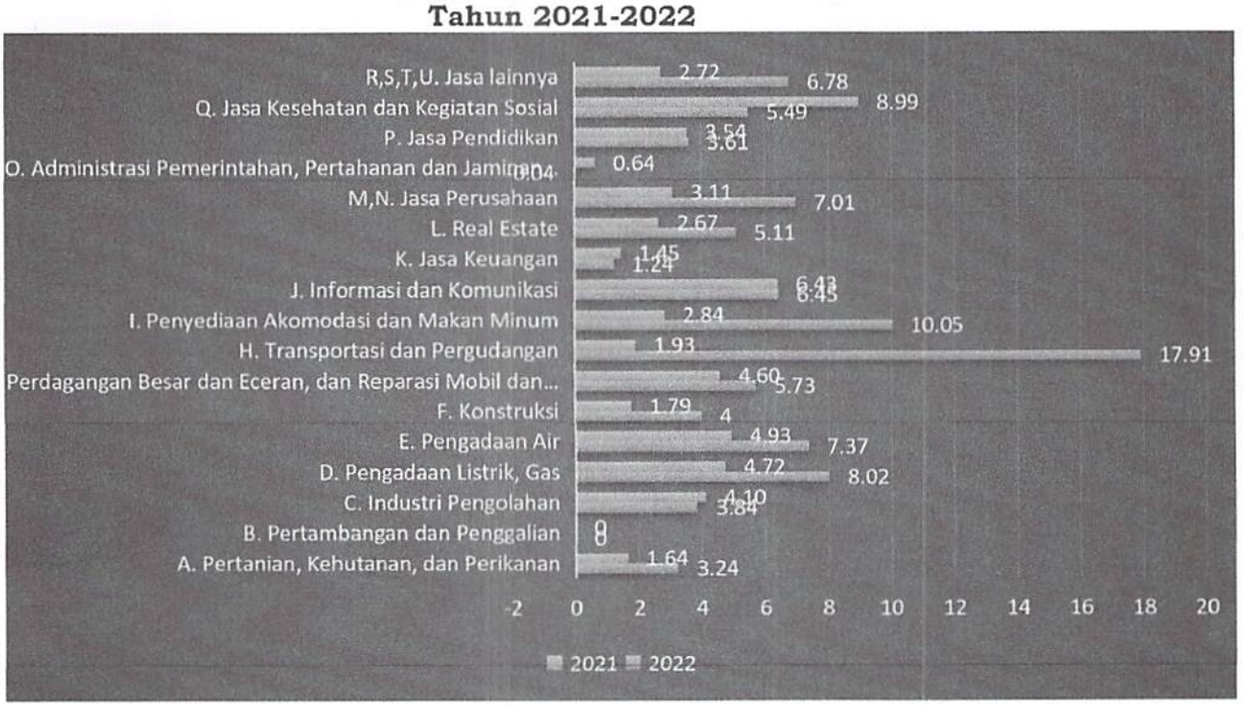

PDRB juga dapat dijelaskan dari sisi pengeluaran (demand). Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan komponen-komponen pengeluaran yang terdiri dari 7 komponen yaitu, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT); pengeluaran konsumsi Lembaga Non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT); pengeluaran konsumsi pemerintah(PKP); pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau yang dikenal dengan investasi; perubahan inventori dan ekspor impor.

Grafik. 3.5
PDRB Banjarmasin Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah) Tahun 2021-2022

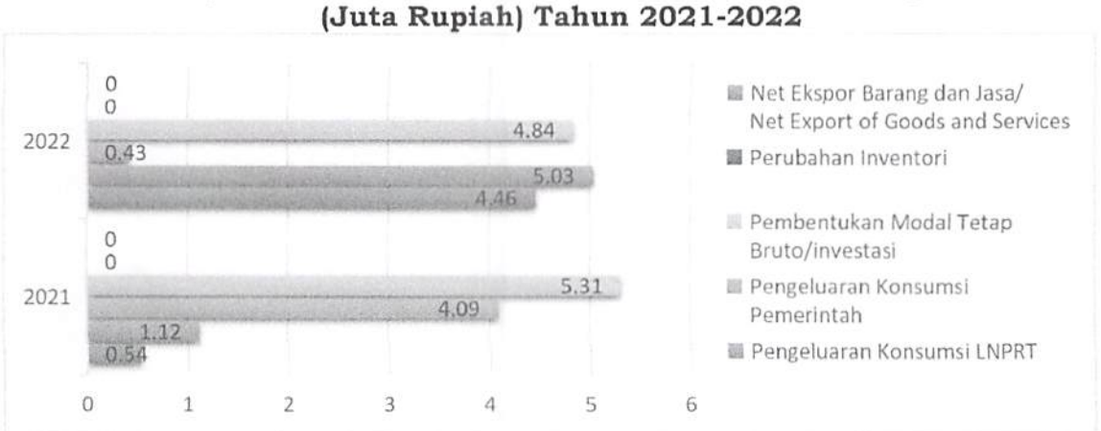

Sumber data : BPS Kota Banjarmasin

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tabel 3.2

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tahun Dasar 2010 (Persen)

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen)		
	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.43	2.38	2.30
B. Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00
C. Industri Pengolahan	17.19	17.35	16.73
D. Pengadaan Listrik, Gas	0.40	0.41	0.40
E. Pengadaan Air	1.23	1.23	1.21
F. Konstruksi	9.97	9.99	9.89
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.57	12.67	12.84
H. Transportasi dan Pergudangan	9.92	9.81	11.42
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.15	3.10	3.17
J. Informasi dan Komunikasi	6.61	6.67	6.59
K. Jasa Keuangan	12.29	12.27	12.12
L. Real Estate	3.61	3.56	3.46
M,N. Jasa Perusahaan	2.87	2.82	2.80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.40	5.22	4.78
P. Jasa Pendidikan	5.04	5.00	4.77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.99	5.27	5.22
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.34	2.26	2.31
PDRB	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS Kota Banjarmasin, 2023

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Perkembangan Dan Proyeksi APBD Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2023

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Kota Banjarmasin sebesar Rp. 2.324.211.638.750,- dan di proyeksikan tidak ada perubahan proyeksi Pendapatan di APBD Perubahan Tahun 2023, secara rinci proyeksi pendapatan Kota Ban jarmasin Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tabel 3.3
Proyeksi Pendapatan Perubahan Tahun 2023

URAIAN	APBD TA 2023	PROYEKSI APBD-P TA 2023	BERTAMBAH BERKURANG
PENDAPATAN	**2.324.211.638.750**	**2.324.211.638.750**	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**822.243.065.500**	**822.243.065.500**	-
Pajak Daerah	575.206.706.000	575.206.706.000	-
Retribusi Daerah	56.764.532.000	56.764.532.000	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.500.000.000	46.500.000.000	-
Lain-lain PAD yang Sah	143.771.827.500	143.771.827.500	-
PENDAPATAN TRANSFER	**1.499.340.573.250**	**1.499.340.573.250**	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.199.650.608.000	1.199.650.608.000	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	299.689.965.250	299.689.965.250	-
JUMLAH PENDAPATAN	**2.324.211.638.750**	**2.324.211.638.750**	-

3.2.1.2 Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah Pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.474.275.825.984,- Penambahan Belanja sesuai di peruntukan untuk percepatan pencapaian target-target sasaran strategis daerah yang di mana di sesuaikan dengan Periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2023 Perubahan

URAIAN	APBD TA 2023	PROYEKSI APBD-P TA 2023	BERTAMBAH BERKURANG
BELANJA DAERAH	**2.513.152.688.138**	**2.513.152.688.138**	
Belanja Operasi	**1.810.533.781.091**	**1.802.555.339.178**	**1.708.137.846**
Belanja Pegawai	836.451.618.058	836.451.618.058	-
Belanja Barang dan Jasa	906.519.579.633	880.311.675.028	**1.708.137.846**
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Arpait SKPD

U R A I A N	APBD TA 2023	PROYEKSI APBD-P TA 2023	BERTAMBAH BERKURANG
Belanja Hibah	66.304.583.400	84.534.046.092	-
Belanja Bantuan Sosial	1.258.000.000	1.258.000.000	-
Belanja Modal	**686.754.025.737**	**657.039.726.766**	**(150.064.187.234)**
Belanja Modal Tanah	125.673.906.998	115.138.906.998	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.707.629.687	146.817.382.626	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.126.264.545	207.889.632.945	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.695.345.907	186.139.345.907	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	345.993.000	1.054.458.290	-
Belanja Modal Aset Lainnya	204.885.600	-	
Belanja Tidak Terduga	**15.864.881.310**	**14.680.760.040**	-
Belanja Tidak Terduga	15.864.881.310	14.680.760.040	-
JUMLAH BELANJA	**2.513.152.688.138**	**2.474.275.825.984**	**(38.876.862.154)**

3.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah pada Tahun 2023 dimaksudkan untuk menutupi perkiraan defisit. Pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya ditambah efisiensi belanja daerah TA. 2023 di proyeksikan mencapai Rp. 150.064.187.233,-

Tabel 3.5
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Banjarmasin
APBD Perubahan Tahun 2023

U R A I A N	APBD TA 2023	PROYEKSI APBD-P TA 2023	BERTAMBAH BERKURANG
PEMBIAYAAN DAERAH	**188.941.049.388**	**150.064.187.233**	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**198.941.049.388**	**160.064.187.233**	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

URAIAN	APBD TA 2023	PROYEKSI APBD-P TA 2023	BERTAMBAH BERKURANG
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	198.941.049.388	160.064.187.233	**(38.876.862.155)**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	
Pembiayaan Netto	**188.941.049.388**	**150.064.187.233**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**0**	

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini di kemukkan secara eksplisit perumusan sasaran Kota Banjarmasin beracuan pada :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD) Tahun 2021-2026
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin (RPJMD) Tahun 2021-2026
4. Dokumen Sustainable Development Goals
5. Pokok-pokok pemikiran DPRD Kota Banjarmasin

Selain beracuan pada dokumen-dokumen tersebut diatas prioritas pembanguna Kota Banjarmasin berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan tahun terakhir dari periode RPJPD Kota Banjarmasin tahun 2005 - 2025 diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi dan dihadapi. Dengan keterbatasan sumberdaya dan tetap mengacu pada prioritas pembangunan, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Banjarmasin

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin 2021 - 2026 telah dijabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bhakti kepala daerah terpilih yaitu 2021 - 2026 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, hubungan tersebut disajikan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tabel 4.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangun

MISI	TUJUAN	SASARAN
Visi : BANJARMASIN BAIMAN DAN LEBIH BERMARTABAT		
1. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan	1. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sector 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan. 2. Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah 3. Meningkatnya daya beli masyarakat 4. Meningkatnya daya saing investasi daerah 5. Menurunnya penduduk miskin perkotaan 6. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan
3. Menguatkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat	Terwujudnya Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram, dan aman	Optimalnya penegakan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan
5. Mengembangkan pariwisata berbasis	Meningkatkan daya dukung dan daya tarik pariwisata	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

MISI	TUJUAN	SASARAN
sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan	berbasis sungai	sungai dan pelestarian budaya Banjar
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi	Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani	1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Sesuai dengan Misi RPJMD Kota Banjarmasin 2021-2026 sasaran pembangunan tahun 2023 di arahkan untuk mencapai sasara utama yang mencakup sasaran Ekonomi, Pembangunan manusia,kesejahteraan,tenaga kerja,dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan sebagaimana pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Indikator Makro Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2023

NO	INDIKATOR	2021		2022	2023
		Target	Capaian	Target RPJMD	Target
1.	IPM	77,47	77,57	77,47	78,68
2.	TPT	6,65	8,32	6,18	7,8 - 6,21
3.	LPE	7,24	-1,91	7,55	5,00
4.	Angka Kemiskinan	3,79	4,39	3,67	4,35
5.	Gini Ratio	0,30	0,34	0,29	0,31
6.	IKLH	55,27	58.85	60.15	58,22

4.2. Prioritas Pembangunan

4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN),seperti dijabarkan pada Gambar 4.1. Penjelasan masing-masing PN akan mencakup penjelasan tentang tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi

Kabag. Pemerintahan | Kabag. Hukum | Asisten SETDA

penentuan sasaran PN yang hendak dicapai,dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

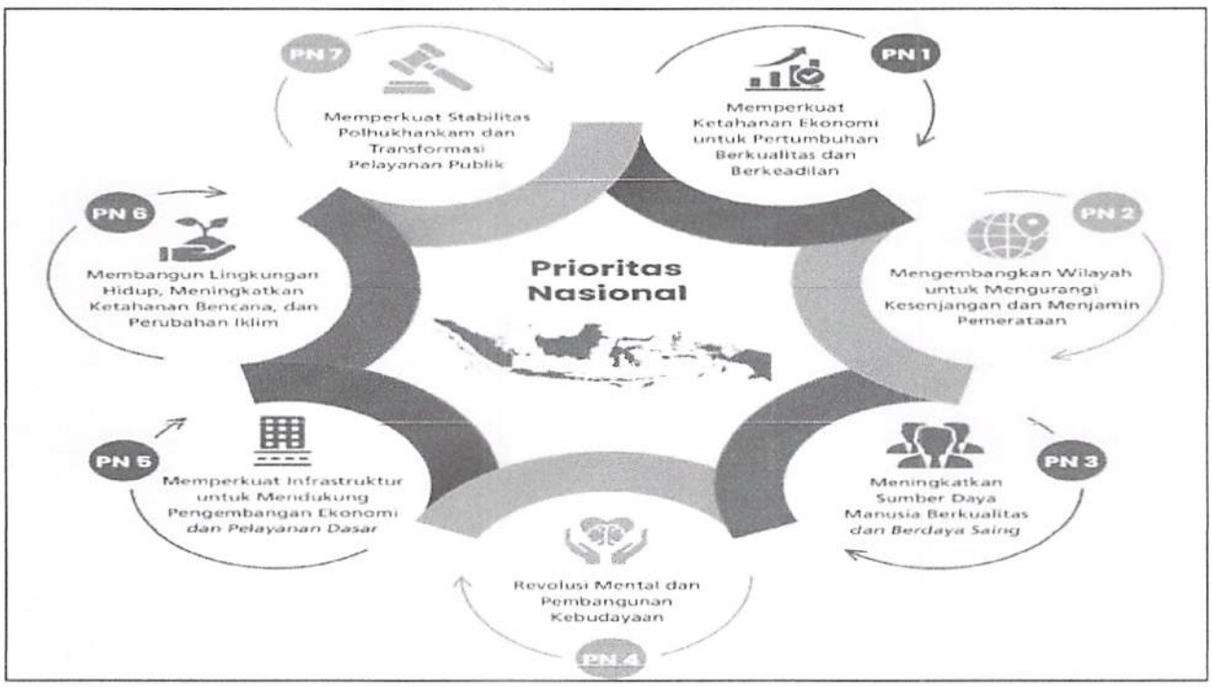

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **"Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**, Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106-107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Adapun target kontribusi tiap provinsi dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2023 yang diukur dalam indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target Kontribusi Tiap Provinsi Dalam Pencapaian Target Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Kode Provinsi	Provinsi	Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Target Tingkat Kemiskinan (%)**	Target Tingkat Pengangguran Terbuka(%)**
1.	6300	KALIMANTAN SELATAN	4.0 – 4.5	4.35-3.99	4.2 – 3.9

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

   Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan PP. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada gambar berikut.

Gambar 4.2
Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

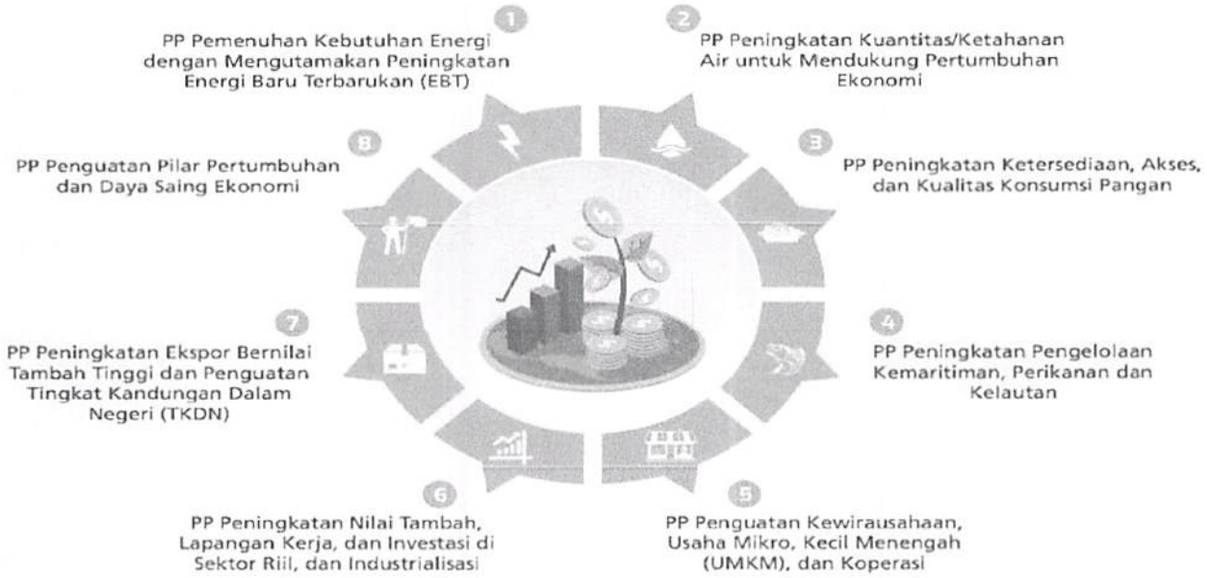

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2022 sebagai berikut:

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional 1 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin

Tahun 2023

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	**SASARAN NASIONAL**	**Indikator**		**Target 2023**	**Indikator Daerah (Rakortekbang)**	**Target Daerah (Rakortekbang)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan								
1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1.1	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Giga Watt) – kumulatif	17,90				
		1.2	Pemanfaatan biofuel untuk domestik (Juta Kilo Liter)	14,60				
2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	2.1	Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	3,63				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		**SASARAN NASIONAL**	**Indikator**	**Target 2023**	**Indikator Daerah (Rakortekbang)**	**Target Daerah (Rakortekbang)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
3	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	103-105				
			3.2 Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100				
			3.3 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57				
			3.4 Prevalence of Undernourishment(PoU) (%)	5,20				
			3.5 Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	4				
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	4.1 Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1b)) (juta ha)	21,90				
			4.2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam	≤76				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			batasan biologis yang aman (14.4.1b)) (%)					
			4.3 Produksi perikanan (juta ton)	31,01	Produksi Perikanan Tangkap	10.004 ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP3
					Produksi Perikanan Budidaya	2.718,43 ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			4.4 Produksi garam (juta ton)	2				
			4.5 Nilai Tukar Nelayan (nilai)	106-107				
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	5.1 Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)*) (%)	21,44				
			5.2 Pertumbuhan wirausaha (%)	2,74	Meningkatnya Usaha mikro yang bertranformasi	0,3 %	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		**SASARAN NASIONAL**	**Indikator**	**Target 2023**	**Indikator Daerah (Rakortekbang)**	**Target Daerah (Rakortekbang)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
					dariinfromal menjadi formal		Mikro	
			5.3 Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,40				
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	6.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	5,50-6,08	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	4,6 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperdagin
			6.2 Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	18,80	Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB	18.77 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperdagin
			6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif(Rp Triliun)	1279, 00				
			6.4 Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	21,70	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	26.453	Sub Kegiatan Koordinasi,sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan	Disperdagin

NASIONAL				DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	**SASARAN NASIONAL**	**Indikator**	**Target 2023**	**Indikator Daerah (Rakortekbang)**	**Target Daerah (Rakortekbang)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
				Nonmigas		Sumber Daya industri	
		6.5 Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2b)) (%)	15,50				
		6.6 Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2b)) (juta orang)	14,85				
		6.7 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	20,68				
		6.8 Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	1250-1350	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1.154.000.000 K	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMTPSP
		6.9 Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp	483,9				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Triliun)					
			6.10 Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%)c)	3,6–3,8				
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Negeri	Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	7.1 Neraca perdagangan (US$ miliar)	38,3-38,5				
			7.2 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	3,9-4,7	Pertumbuhan nilai ekspor non migas		Program Pengembangan Ekspor	Disperdagin
			7.3 Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	3,5-7,4				
			7.4 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	600	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	785000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			7.5 Nilai ekspor hasil	7,66				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			perikanan (US$ Miliar)c)					
			7.6 Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)a)	8,5-10,7				
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	8.1 Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,53-4,57				
			8.2 Skor Logistic Performance Index (skor)c)	3,4				
			8.3 Rasio M2/PDB (%)	48,5-49,5				
			8.4 Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat)3)	35-39				
			8.5 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax	96)				

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			administration system)(%)					
			8.6 Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%)	Menu-run				
			8.7 Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	31,94				
			8.8 Penyediaan daa eknomi dan sosial yang berkualitas (Database)	8				

Pertimbangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Pembangunan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Sasaran pengembangan wilayah pada RPJMN 2020–2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2022, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan Agenda pembangunan tergambarkan pada gambar di bawah ini

Kabag. Hukum

Gambar 4.3
Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan Agenda pembangunan diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2022 sebagai berikut: dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Perundangan | Kabag. Hukum | Sepra

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Nasional 2 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin
Tahun 2023

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan								
1.	Pembangunan Wilayah Sumatera							
2.	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali							
3.	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara							
4.	Pembangunan Wilayah Kalimantan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	4.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (persen/tahun) 1)	5,40	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	Indikator Makro Daerah Kota Banjarmasin (yang di sepakati dengan Provinsi Kalsel)	
			4.2 IPM Provinsi Wilayah Kalimantan (min-maks) 2)	71,22 – 79,25	Indeks Pembangunan Manusia	78,68	Indikator Makro Daerah Kota Banjarmasin (yang di sepakati dengan Provinsi Kalsel)	
			4.3 Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen) 3)	3,30	Persentase Penduduk Miskin	4,35	Indikator Makro Daerah Kota Banjarmasin(yang di sepakati dengan	

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
							Provinsi Kalsel)	
5.	Pembangunan Wilayah Sulawesi							
6.	Pembangunan Wilayah Maluku							
7.	Pengembangan Wilayah Papua							

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada gambah di bawah ini Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

a. pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
b. pengembangan Komoditas Unggulan yang difokuskan pada food estate di Kalimantan Tengah; peningkatan produktivitas karet, lada, pala, cengkeh, kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
c. pengembangan Kawasan perkotaan dengan fokus pada pembangunan IKN dan kota besar penyangganya (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan

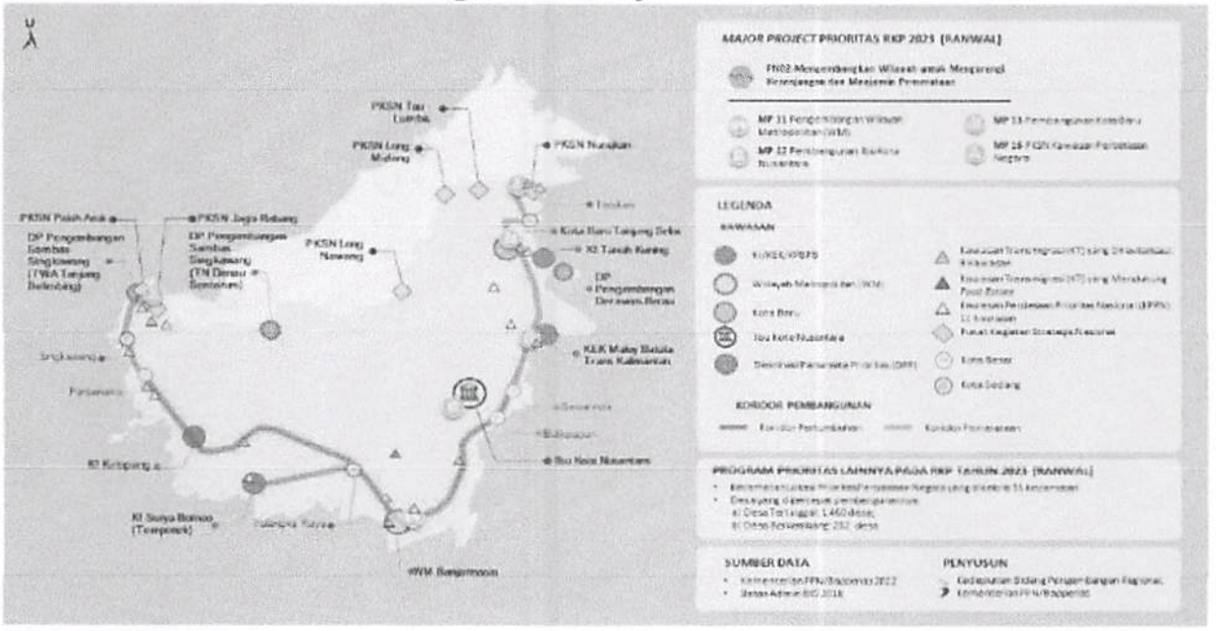

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

d. pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan palayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 10 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, sembilan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi, dua kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional, 11 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN Bulungan, KPPN Nunukan, KPPN Kubu Raya, KPPN Sambas, KPPN Bengkayang, dan KPPN Mempawah, 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri, serta 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina; dan

e. kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian SPM daerah, peningkatan inovasi daerah, pengembangan kerja sama antardaerah, penataan regulasi daerah, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan dengan fokus pada (a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi Covid-19 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020; (b) pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital; dan (c) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.

b. Menyempurnakan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif yang difokuskan pada Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang terdiri dari: (a) perluasan cakupan kepesertaan khususnya bagi sektor informal untuk mendorong pemulihan pascapandemi; (b) peningkatan keaktifan pemerintah

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

daerah dalam melakukan pemutakhiran dan perluasan data penduduk miskin dan rentan secara berkala dari tingkat desa/kelurahan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program; (c) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (d) perluasan jangkauan bantuan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi Covid-19, korban perdagangan manusia, korban Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya; (e) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (f) pengembangan registrasi sosial ekonomi dan digitalisasi monografi desa-kelurahan untuk mendukung pengelolaan data penduduk; (g) integrasi, digitalisasi, dan transformasi bantuan sosial, termasuk transformasi subsidi energi (LPG 3kg dan Listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; dan (h) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan.

c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama keberlanjutan reformasi sistem kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan. Reformasi sistem kesehatan akan difokuskan pada (a) penguatan pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (b) penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); (c) peningkatan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (d) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (e) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security dan resilience); (f)

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

pengendalian penyakit dan imunisasi; (g) peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan; dan (h) pengembangan teknologi informasi, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Upaya pengendalian pandemi Covid-19 akan tetap dilakukan dengan melanjutkan vaksinasi Covid-19. Upaya percepatan penurunan kematian ibu akan difokuskan pada pengembangan sistem rujukan maternal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan deteksi dini faktor risiko ibu hamil, pemenuhan sarana, ketersediaan darah setiap waktu, KB pascasalin, serta revitalisasi akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan pelayanan KB di RS (PKBRS) serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pendampingan bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga. Upaya percepatan penurunan stunting akan dilakukan melalui penajaman intervensi spesifik dan sensitif dengan menjamin ketersediaan obat dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, edukasi pola asuhan gizi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, penguatan tatalaksana gizi buruk, akses air minum dan sanitasi layak, serta memberikan pendampingan bagi keluarga 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, yang akan difokuskan pada (a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan penerapan kurikulum dan model pembelajaran yang dapat mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi, sistem kualitas penilaian hasil belajar termasuk penilaian pada tataran kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter, peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah, serta peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan siswa (student well-being) serta kesehatan mental dalam pendidikan; (b) percepatan pelaksanaan wajib belajar 12

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

tahun, dengan meningkatkan pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), pemenuhan sarpras pendidikan yang memperhatikan asesmen kebutuhan, dan afirmasi kewilayahan termasuk pemulihan akibat bencana, (c) peningkatan strategi lintas sektor untuk penerapan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), dan penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru dan dosen, penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus; dan (e) penciptaan lingkungan ramah anak. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada (a) penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; (c) peningkatan literasi politik

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

perempuan; dan (d) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO. Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada (a) penguatan koordinasi lintas-sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; dan (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

f. Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan kesempatan kerja untuk mendukung akselerasi graduasi program, melalui (a) pendampingan kelompok miskin dan rentan untuk memulai dan mengembangkan usaha yang produktif; (b) peningkatan akses keperantaraan bagi pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan teknis yang komprehensif, serta sumber permodalan yang mudah dan murah; (c) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya, termasuk lahan; dan (d) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi Covid-19, dan kelompok rentan lain untuk memperoleh kesempatan berusaha dan mencari pekerjaan.

g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui (a) reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital; (b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia; (c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan; (d) penguatan pembinaan perguruan tinggi

Kesubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

swasta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi; (e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan kerja sama inovasi Triple-Helix di Science Techno Park (STP); (f) pemfokusan anggaran penelitian dan pengembangan untuk flagship Prioritas Riset Nasional 2020–2024 serta penanganan pandemi Covid-19; dan (g) pembudayaan olahraga melalui sport tourism serta pemanfaatan momentum keikutsertaan pada event olahraga untuk penguatan pembinaan dan pembibitan talenta olahraga dalam pencapaian prestasi olahraga di tingkat dunia, di antaranya melalui Asian Games dan Asian Para Games 2022 di Tiongkok.

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak Covid-19, sasaran utama pembangunan SDM difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan STP, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022.

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (4) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (6) pengentasan kemiskinan; dan (7) peningkatan produktivitas dan daya saing, seperti pada Gambar gambar di bawah ini:

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Gambar 4.5
Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

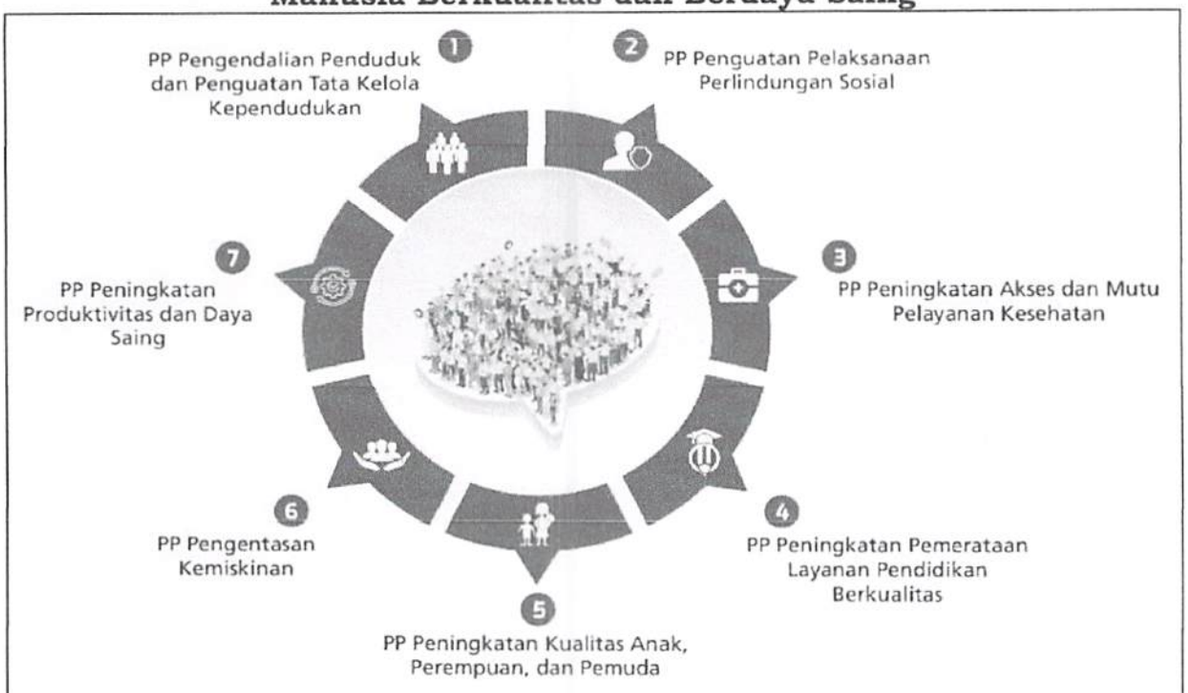

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2022 sebagai berikut:

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tabel 4.6
Sinkronisasi Prioritas Nasional 3 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin
Tahun 2023

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		**SASARAN NASIONAL**	**Indikator**	**Target 2023**	**Indikator Daerah (Rakortekbang)**	**Target Daerah (Rakortekbang)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing								
1.	Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	1.1 Persentase daerah yang menyelen- ggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	89,00	Pengembangan Sistem Layanan dan rujukan terpadu	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinas Sosial
			1.2 Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunanprogram-program penanggulangan kemiskinan (%)	80,00				
			1.3 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	90,00	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan	80	Sub KEgiatanPendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

NASIONAL						DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator		Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						kemiskinan			
			1.4	Persentase kepemilikan akta kela- hiran pada penduduk 0–17 thn (%)	98,00	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98,00%	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1.5	Persentase Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)	50,00				
2.	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	91,00				
			2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	12				
			2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	10,00				
			2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-	15				

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			prinsip kabupaten/kota inklusif (%)					
			2.5 Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan					
			2.5.1 Pekerja formal (%)	67,40				
			2.5.1 Pekerja informal (%)	16,93				
3.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan						
			3.1 Persentase persalinan di fasyankes (%)	93,00	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
			3.2 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	62,92	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	74,51	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPKBPM
			3.3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,70	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	12	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	DPPKBPM

Kasubbag. Perundang-u	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			(%)		need)		Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			3.4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate(ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	20,00	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPKBPM
			3.5 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia anak 12-13 bulan (%)	7,50	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	94,5	Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan
			3.6 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,30				
			3.7 Jumlah kabupaten/kota penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment coverage)(%)	90				
			3.8 Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi	110				

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			malaria (kabupaten/kota)					
			3.9 Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,19	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeki HIV	0,19	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes
			3.10 Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	90				
			3.11 Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (Kabupaten/Kota)	380				
			3.12 Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) (Kabupaten/Kota)	474				
			3.13 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	90,00				
			3.14 Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	95,00	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota	100		Dinas Kesehatan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
					yang terakreditasi			
			3.15 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	71,00	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan
			3.16 Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	85,00				
			3.17 Persentase obat memenuhi syarat (%)	96,00				
			3.18 Persentase makanan memenuhi syarat (%)	86,00				
4.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	4.1 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio) SMA/SMK/MA Sederajat Pendidikan Tinggi	 0,82 0,31				

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			4.2 Proporsi anak di atas batas kompe- tensi minimal dalam tes PISA (%):					
			Membaca	33,00				
			Matematika	30,00				
			Sains	42,60				
			4.3 Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)					
			4.3.1. Literasi	60,20				
			4.3.2. Numerasi	29,20				
			4.4 Tingkat penyelesaian pendidikan %					
			4.4.1. SD/MI/sederajat	91,41	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100,00%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			4.4.2. SMP/MTs/sederajat	91,08				
			4.4.3. SMA/SMK/MA/sederaja	69,68				

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			t					
			4.5 Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	71,20				
			4.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	31,89				
5.	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha	5.1 Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	9,08				
			5.2 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Menurun				
			5.3 Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) (nilai)	75,60 - 77,16	Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) (nilai)	80,1	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	54,38				

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Perempuan (%)					
			5.5 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Menurun				
			5.6 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	Meningkat	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	125	Program Pengembangan Kapasitas DAya Saing Kepemudaan	Dispora
			5.7 Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	Meningkat				
			5.8 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	0,50				
			5.9 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang	7,05				

Kasubbag. Perwadangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			mengalami masalah kesehatan sehingga menganggu aktivitas / kegiatan sehari hari selama 1 bulan terakhir dikelompok umur 16 – 30 tahun (%)					
6.	Pengentasan Kemiskinan	Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	6.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	45,00	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	44 KPM	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
			6.2 Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	332,757				
7.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	7.1 Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	2,60				
			7.2 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	25,10				
			7.3 Persentase lulusan PT	60,71				

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)					
			7.4 Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	231,00				
			7.5 Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	550				
			7.6 Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	180				
			7.7 Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	2750				
			7.8 Jumlah paten granted(domestik) (paten)	950				

Kasubbag. Perundang-u	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			7.9 Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	17				
			7.10 Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	132				
			7.11 Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)a)	13				
			7.13 Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan:	8				
			7.13.1 Berbasis perguruan tinggi (unit)	5				
			7.13.2 Berbasis nonperguruan tinggi (unit)	3				
			7.14 Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	10				

Asisten Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			7.15 Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:					
			7.15.1 Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)	20				
			7.15.2 Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pasca bencana (teknologi)	35,00				
			7.16 Peringkat pada Asian Games	4				
			7.27 Peringkat pada Asian Para Games	1				

Kabag. Perekonomian | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
b. Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmonisasi sosial ; dan
d. Mengembangkan budaya literasi sosial,kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, menghadapi tantangan antara lain (1) pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai katalisator pendorong pemulihan ekonomi nasional; (2) optimalisasi proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter; (3) penyelenggaraan layanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki budaya birokrasi bersih, melayani, dan responsif; (4) pengembangan pola asuh, perubahan pola hubungan antaranggota keluarga, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan

masyarakat; (5) pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di K/L, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (6) peningkatan kontribusi koperasi dalam sektor riil dan rantai pasok, serta peningkatan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan sebagai berikut :

a. Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental melalui (a) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik, melalui (i) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan kewargaan, pendidikan moral dan budi pekerti; dan (ii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; (b) peningkatan mutu pelayanan publik melalui pelatihan revolusi mental bagi ASN untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (c) penegakan disiplin ASN melalui penguatan integritas dan optimalisasi penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; (d) peningkatan kualitas keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang berperan penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini melalui (i) pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran; (ii) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup bagi remaja; dan (iii) pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; (e) penguatan peran Gugus Tugas dan pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah dalam melaksanakan kegiatan atau rencana aksi yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) dan relevan dengan kondisi di daerah; dan (f) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui (i) penguatan kelembagaan dan modernisasi koperasi; (ii) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan (iii) penciptaan wirausaha baru yang berdaya saing.

b. Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (a) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta revitalisasi jalur rempah dalam rangka mendukung PEN berbasis kebudayaan; (b) revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta seni budaya; (c) perluasan bantuan sosial bagi para seniman dan pelaku budaya untuk melakukan kegiatan kebudayaan; dan (d) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya.

c. Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial melalui (a) penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif, serta praktik beragama yang moderat, menghargai agama/keyakinan yang lain, berkarakter inklusif dan toleran; (b) pelaksanaan dialog internal dan antarumat beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (c) pengembangan dana sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf, untuk usaha produktif; (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, termasuk kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan (e) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain balai nikah, manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, dan asrama haji.

d. Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b) pengembangan konten literasi terapan; dan (c) pengembangan pusat-pusat layanan literasi berbasis digital.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi

Kasubbag. Perpadangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana disajikan pada Gambar di Bawah ini :

Gambar 4.6
Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

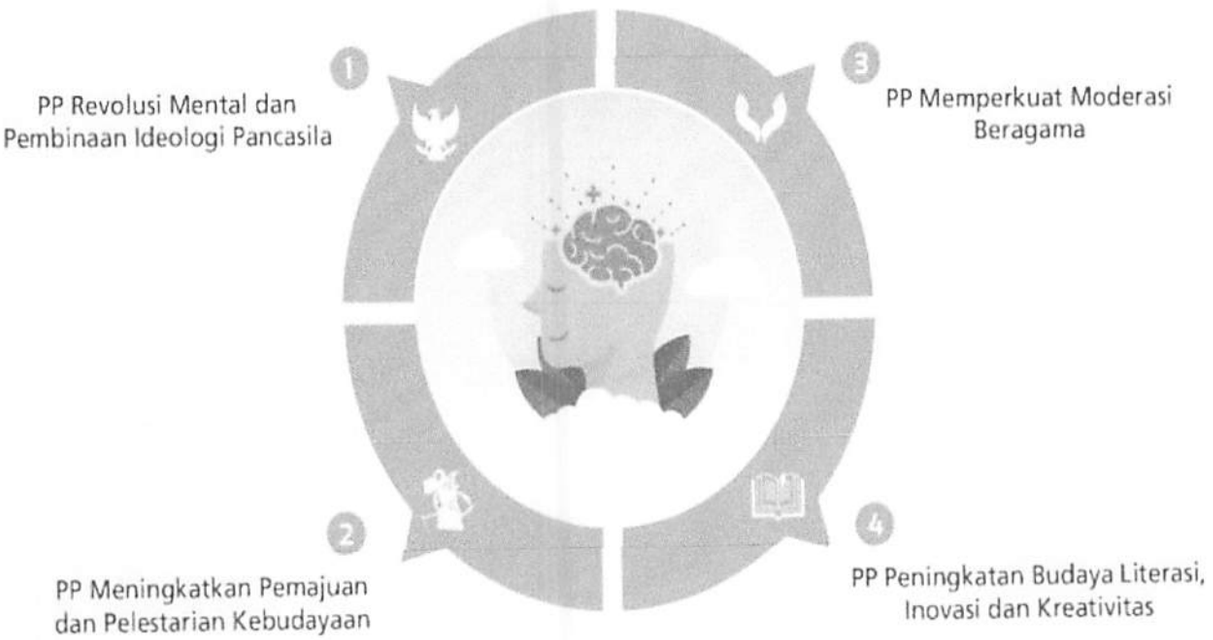

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2022 sebagai berikut:

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Nasional 4 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin

Tahun 2022

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan								
1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	1.1 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani(nilai)	79,30				
			1.2 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih(nilai)	71,95				
			1.3 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib(nilai)	77,88,				
			1.4 Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri(nilai)	63,16				
			1.5 Nilai Dimensi Gerakan	72,36				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			Indonesia Bersatu(nilai)					
		Terwujudnya aktualisasi nilai nilai pancasila	1.6 Nilai Dimensi Ketuhan yang Maha Esa (nilai)	85,08				
			1.7 Nilai Dimensi Kemanusiaan yang adil dan beradab (nilai)	78,94				
			1.8 Nilai Dimensi Persatuan dan Kesatuan Indonesia (nilai)	90,02				
			1.9 Nilai Dimensi Kerakyatan dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan (nilai)	77,14				
			1.10 Nilai Dimensi Keadilan sosial bagi seluruh	64,19				

Kabag. Pemerintahan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
.			rakyat Indonesia					
		Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	1.11 Indeks kerentanan keluarga (nilai)	10,50				
			1.12 Indeks karakter remaja Budaya (nilai)	69,42				
2.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa , meningkatkan kesejahteraan rakyat,dan mempengaruhi arah beradaban dunia	Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama	2.1 Nilai Dimensi warisan budaya (nilai)	54,85				
			2.2 Nilai dimensi ekspresi budaya (nilai)	38,60				
			2.3 Nilai Dimensi ekonomi budaya (nilai)	46,76				
3	Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial	Menguatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang toleran,	3.1 Indeks kepuasaan layanan ibadah haji (Nilai)	85,99				

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		inklusif,dan moderat dikalangan umat beragama	3,.2 Indeks kepuasan pelayan KUA (nilai)	83,00				
			3.3 Nilai dimensi toleransi (nilai)	73,39				
			3.4 Nilai dimensi kesetaraan (nilai)	77,33				
			3.5 Nilai dimensi kerjasama (niai)	76,96				
4.	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	4.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	14,00				

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

Tantangan dalam penyediaan infrastruktur ekonomi terutama dalam pengembangan konektivitas transportasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan upaya penurunan biaya logistik antara lain (1) belum optimalnya konektivitas pada jaringan utama (backbone) meliputi terbatasnya jaringan jalan, belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi, belum optimalnya peran angkutan kereta api, jalur pelayaran belum terbentuk konsolidasi rute (loop) secara optimal, dan jaringan penerbangan yang kurang efisien; (2) belum memadainya ketersediaan konektivitas untuk mendukung kawasan industri prioritas dan smelter, destinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis lainnya termasuk belum terpadunya jaringan jalan nasional dan daerah yang menghubungkan antarkawasan, serta kebutuhan peningkatan layanan bandara, pelabuhan laut, sungai, danau, dan peyeberangan; dan (3) terbatasnya layanan, sarana dan prasarana keperintisan untuk mendukung wilayah 3T dalam

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

penyediaan angkutan logistik laut dan udara untuk menurunkan dispasritas harga, dan penyediaan angkutan perintis penumpang; serta (4) belum optimalnya layanan transportasi umum yang menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan secara tertib dan konsisten.

Strategi penyelesaian isu strategis dan tantangan serta pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasardilakukan melalui lima PP, yaitu (1) infrastruktur pelayanan dasar, (2) infrastruktur ekonomi, (3) infrastruktur perkotaan, (4) energi dan ketenagalistrikan, dan (5) transformasi digital, sebagaimana disajikan pada Gambar di Bawah ini :

Gambar 4.7
Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

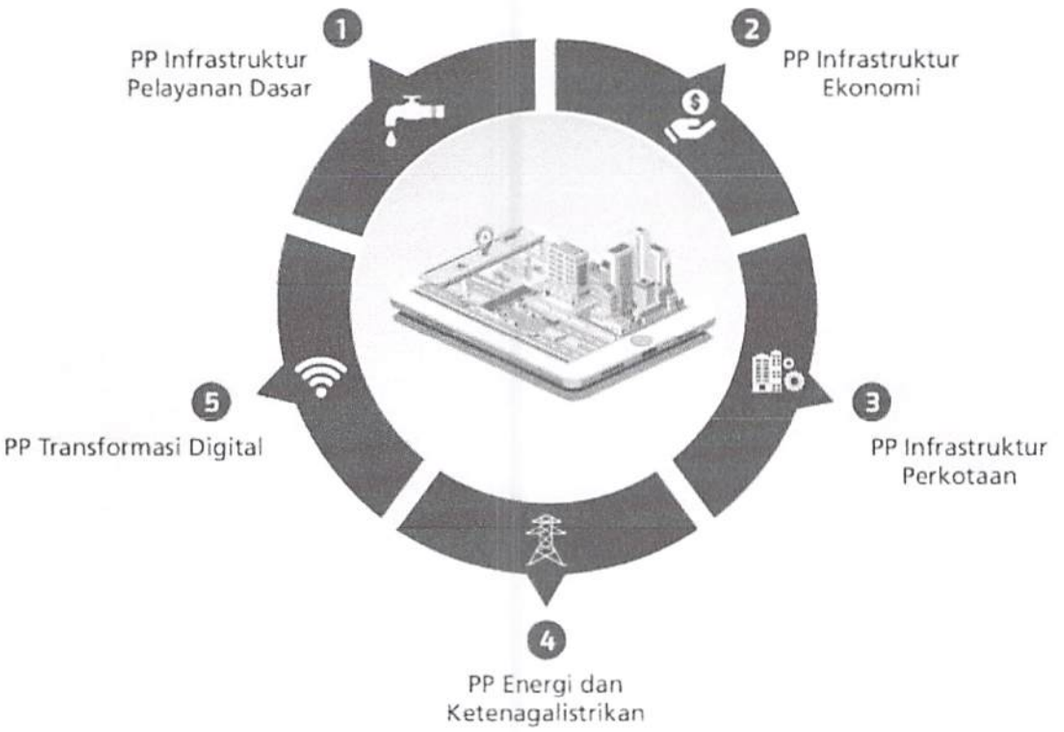

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2022 sebagai berikut:

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tabel 4.8
Sinkronisasi Prioritas Nasional 5 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin
Tahun 2022

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		**SASARAN NASIONAL**	**Indikator**	**Target 2023**	**Indikator Daerah (Rakortekbang)**	**Target Daerah (Rakortekbang)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar								
1.	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1.1 Rasio KPR terhadap PDB (%)	3,60				
			1.2 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan lantai perkapita (%)	94,63				
			1.3 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	87				
			1.4 Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	63,20				

NASIONAL						DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator		Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak, aman dan terjangkau	1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	97,55	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100	Program Pengelolaan dan PEngembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	14,22	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	100	Program Pengelolaan dan PEngembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	28,01	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	100	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
			1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,54	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	0	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
			1.9	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	91,80				

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			1.10 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	86,03 layak,termasuk 13 ,aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	100	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
			1.11 Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	1,49	Persentase angka BABS di tempat terbuka	0	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	DPUPR
			1.12 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	77,64 penanganan dan 14,57 pengurangan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	99	Pengelolaan Pengelolaan Sampah	DLH
		Meningkatnya layanan keamanan dan keselamatan	1.13 Rata-rata tanggap an pencarian dan pertolongan (menit)	25,50				

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		transportasi						
		Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1.14 Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kabupaten/kota)	185,00				
		Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi	1.15 Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m3/kapita)	54,50				
			1.16 Persentase luas sawah beririgasi (%)	54,50				
			1.17 Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (hektar)	300				
2.	Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya konektivitas wilayah	2.1 Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/73/63	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	85	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			2.2 Panjang jalan tol baru yang terbangun	646				

Kabag. Pembangunan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			dan/ atau beroperasi (Km)					
			2.3 Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	672	Panjang jalan daerah yang dibangun	0.745 Km	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	DPUPR
			2.4 Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km'sp)	6658,00				
			2.5 Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	5 (berlanjut)				
			2.6 Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	35,00				
			2.7 Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	16 pelabuhan (8 selesai, 8 berlanjut)				
			2.8 Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	13(berlanjut)				
			2.9 Jumlah rute jembatan udara	43				

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

NASIONAL						DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator		Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			(rute_						
3.	Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasantidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kota)	5 (berlanjut)				
			3.2	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	6 (berlanjut)				
			3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	8,00	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	DPKP
4.	Energi dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan	4.1	Jumlah Produksi Tenaga Listrik (GWh)	406.325				
			4.2	Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (Juta Ton)	5,91				
			4.3	Jumlah Pengguna Listrik (Ribu Rumah	83.219				

Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		efisien	Tangga- kumulatif)					
			4.4 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (kumulatif, Sambungan Rumah)	1.525.077)				
			4.5 Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.276.000				
5.	Transformasi Digital	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	5.1 Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	8,80				
			5.2 Persentase pengguna internet (%)	80,70				
			5.3 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	74,00	Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital	200 org	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c. Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2023 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

Selanjutnya, melanjutkan upaya penguatan sistem ketahanan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; pemantapan sistem data kebencanaan terpadu; sistem peringatan dini terintegrasi; penguatan kelembagaan kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat; serta pengembangan inovasi dan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Upaya penguatan sistem akan didukung dengan investasi pemulihan pascabencana, penegakan standar bangunan, integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana, tata kelola, dan penguatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

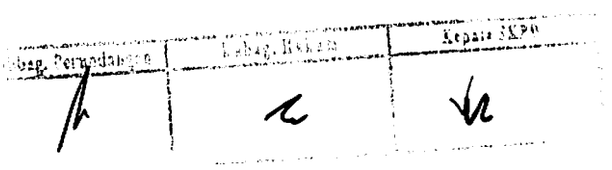

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri atas 3 (tiga) PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini :

Gambar 4.8
Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

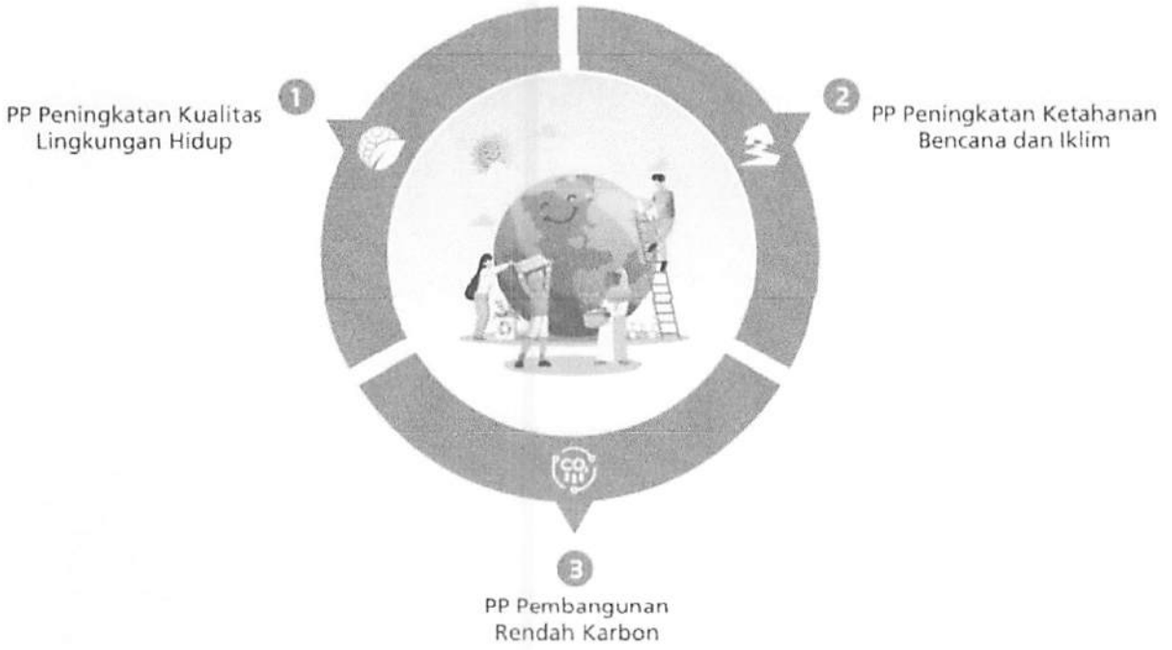

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2022 sebagai berikut:

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tabel 4.9
Sinkronisasi Prioritas Nasional 6 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin

Tahun 2022

NASIONAL						DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator		Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim									
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,40	Indeks Kualitas Air	57,93	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60,00				
			1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,40	Indeks Kualitas Udara	82,99	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	64,50				
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan	2.1	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	0,10b)				

Kepala SKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	(%)					
			2.2 Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	1,00				
			2.3 Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	3,50	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	78%	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DAMKAR
3.	Pembangunan Rendah Karbon	Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (persen)	3.1 Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	13,27c)	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Yang Berhasil Dilakukan Uji Emisi	900 unit	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	DLH
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada	38,05c)				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			sektor lahan (%)					
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	36,81c)				
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	17,88c)				
			Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	7,04c				

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada Gambar di bawah ini :

Gambar 4.9

Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala BKPP

Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

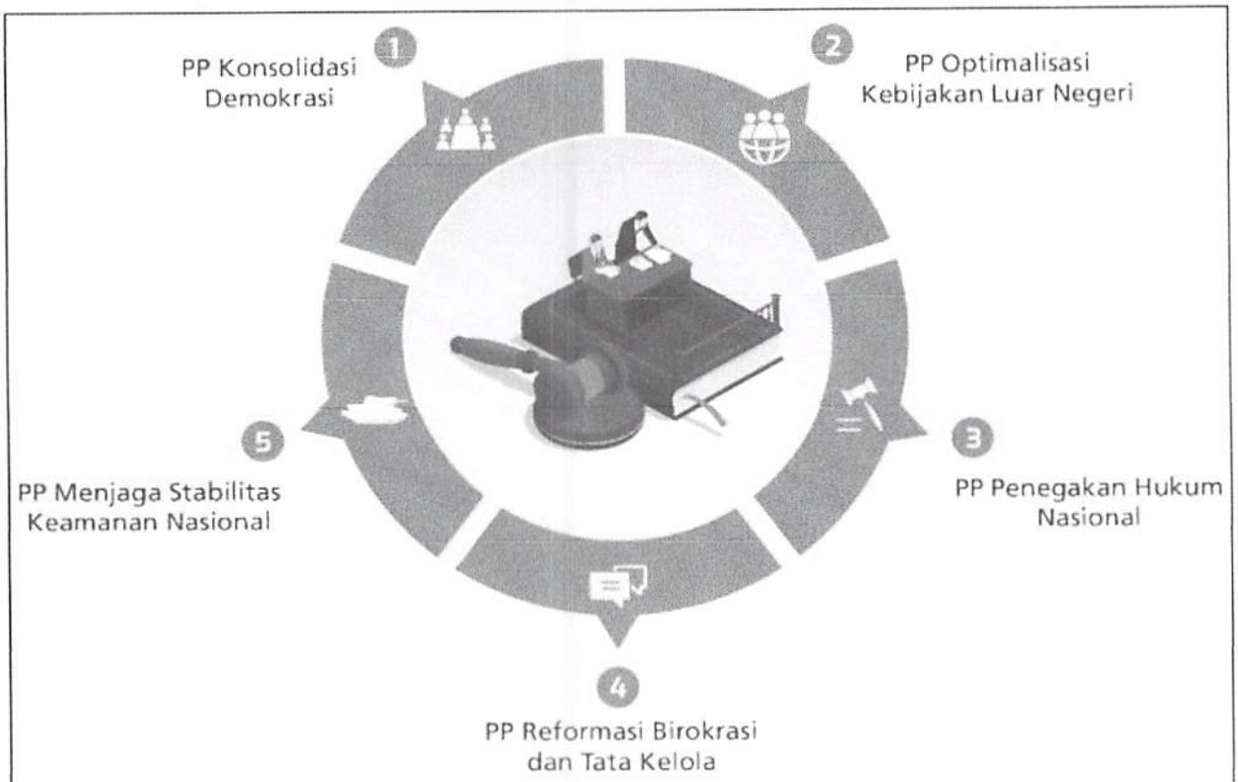

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai dengan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2021 sebagai berikut:

Kabag. Hukum

Tabel 4.10
Sinkronisasi Prioritas Nasional 6 dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin

Tahun 2022

NASIONAL				DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik							
Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (skor)	79,50				
		Skor IDI Variabel Kebebasan (skor)	83,50				
		Skor IDI Variabel Kesetaraan (skor)	79,67				
		Jumlah Regulasi/Kebijakan TataKelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas- Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	2,00				
Optimalisasi Kebijakan Luar	Meningkatnya Efektivitas	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh	14,00				

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Negeri	Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional	Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)					
			Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,95				
			Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI (nilai)	89,00				
	Penegakan Hukum Nasional	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	Indeks Persepsi Anti Korupsi(nilai)	4,09				
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelayanan melalui tata kelola dan Birokrasi	Indeks pelayanan publik (nilai)					
			4.1.1 Kementerian/Lembaga	4,1				
			4.1.2 Provinsi	3,9				

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala TKPD

NASIONAL					DAERAH			
PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		SASARAN NASIONAL	Indikator	Target 2023	Indikator Daerah (Rakortekbang)	Target Daerah (Rakortekbang)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			4.1.3 Kabupaten/Kota	3,7	Indeks Reformasi Birokrasi		Prioritas Daerah ke 4	
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional	Indeks Kekuatan Militer(nilai)	0,21				
			Indeks GlobalTerorisme(nilai)	4,29				
			Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	>60				
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional (nilai)	3,30	Indeks Keamanan dan Ketertiban			

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang juga merupakan salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah setingkat kota dalam rangka untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 **"PENGUATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN"**, Tema tersebut diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut :

a. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan

Fokus terhadap bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan adalah penjabaran dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk pembangunan manusia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Fokus terhadap tiga hal ini adalah upaya untuk memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam jangka pendek,fokus terhadap tiga hal, terutama fokus pada bidang kesehatan ini diharapkan dapat jawaban untuk menanggulangi dampak pandemi. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pemantapan kondisi sosial budaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kalimantan Selatan dalam menghadapi tekanan globalisasi.

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan yang paling terdampak dalam dua tahun terakhir akibat adanya pandemic Covid-19. Dengan mengupayakan perkuatan perekonomian pada skala masyarakat diharapkan perekonomian dapat tumbuh lebih cepat sehingga keselarasan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

Kabag. Perekonomian	Kabag. Hukum	Asisten III

c. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata

Pada perekonomian skala besar terus diupayakan transformasi perekonomian Kalimantan Selatan yang masih bertumpu pada sector pertambangan agar dapat bebagi kontribusi dengan tiga sektor yang akan dikembangkan. Investasi akan diarahkan pada perkuatan hilirisasi industry terutama kawasan-kawasan industry yang telah ditetapkan baik skala Nasional maupun skala daerah. Begitu pula pada sektor pertanian secara uas akan dilakukan peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai produk denga tetap memperhatikan kesejahteraan para petani sebagai subjek utama pada sector ini. Yang terakhir adalah sector pariwisata dengan pengembangan ekowisata dan edu-wisata di objek-objek wisata yang bersifat budaya lokal dan alam lingkungan yang memperkuatke-khasan Kalimantan Selatan. Tidak lupa perkuatan Geopark Meratus yang telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional agar dapat ditingkatkan menjadi Unesco Global Geopark (UGG).

d. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19

Fokus pembangunan selanjutnya dihaapkan pada tahun 2023 untuk meminimalisir bencana yang terjadi seperti Banjir, kebakaran hutan dan lahan serta puting beliung. Program-program diarahkan mampu menanggulangi banjir agar kejadian banjir awal tahun 2021 tidak terjadi lagi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat 6 Prioritas Pembangunan pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala BKPP

Gambar 4.10
Prioritas dan Sub Prioritas Provinsi Kalsel Tahun 2023

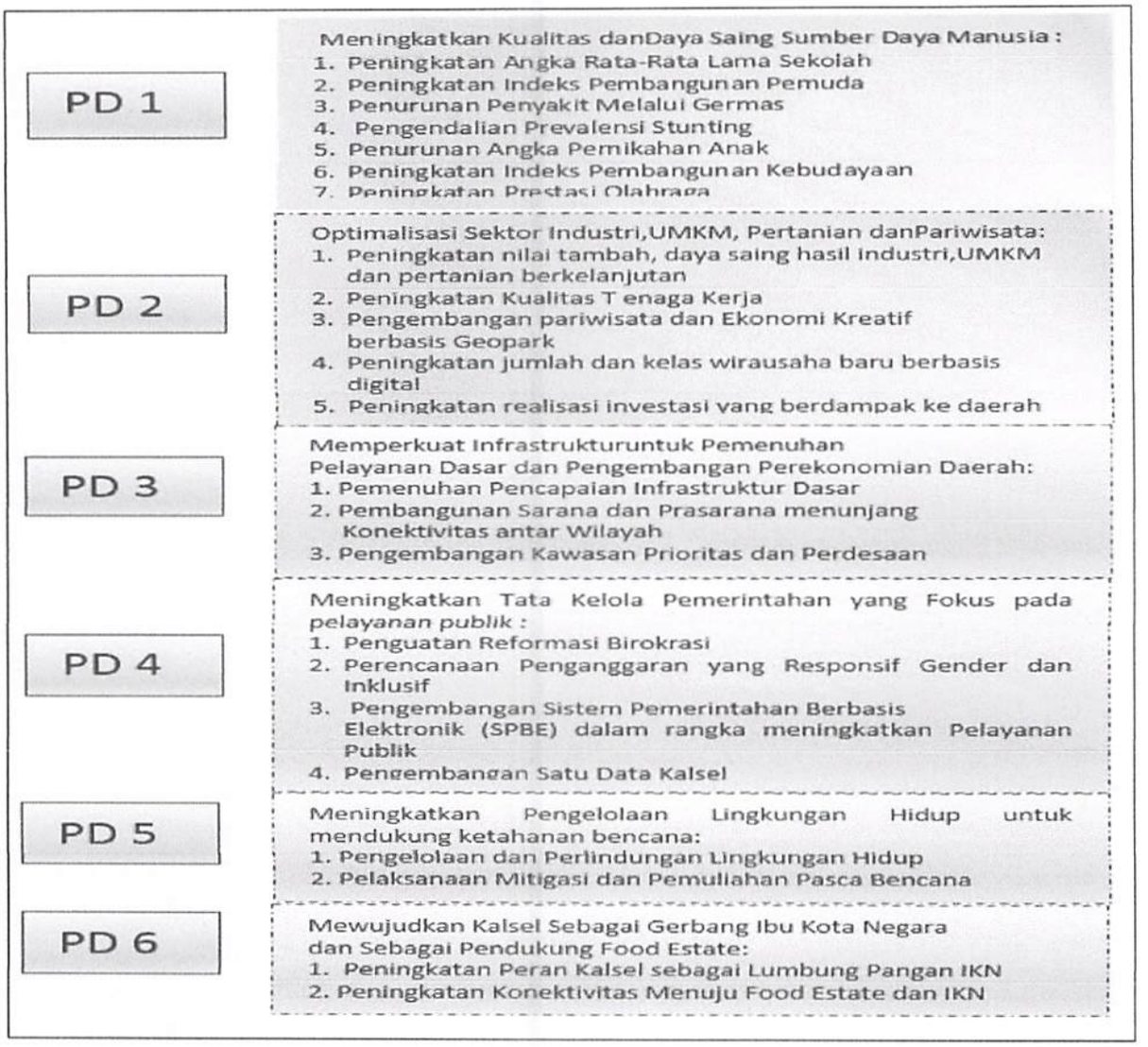

Agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan ini diturunkan ke dalam Prioritas Daerah dan Sub Prioritas yang di sinkronisasikan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin sesuai Tahun 2023 sebagai berikut:

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	2	

Tabel 4.11
Sinkronisasi Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Program,Kegiatan Sub Kegiatan Prioritas Kota Banjarmasin Tahun 2023

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,56 tahun	9,98 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,66%			
		Penurunan Penyakit Melalui Germas	Usia Harapan Hidup	71,05 Tahun	71,25 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	26%	21,35%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak	13,77%			
		Peningkatan Indeks	Indeks Pembangunan	61,67			

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pembangunan Kebudayaan	Kebudayaan	indeks			
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	37%			
			Jumlah Medali Emas	40 buah			
2	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pengembangan Geopark	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,5 % - 3,45 %			
			LPE Sektor Industri Pengolahan	2,5 % - 3,65 %			
			LPE Sektor Perdagangan	7,2 % - 7,85 %			
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,94 %	63,46%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	LPE Sektor Peny. Akomodasi dan Mamin	6,61-7,10%			
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10%	6%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
			Kenaikan Jumlah Wisman	5%	1,25%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
			Tingkat Hunian Akomodasi	44%			
		Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital	Pengeluaran perkapita	12,2 juta rupiah			
			Persentase usaha kecil menjadi wira usaha	18,17%		Sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	26,03%		Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	12,55 Triliun Rupiah			
3	Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	94,3 4%	100 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	93%	100%	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Cakupan Pelayanan Persampahan	50,27%	40 %	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	DLH
			Luas Genangan yang Tertangani (Drainase)	7%	4,56 Km	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam	Dinas PUPR

Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						Daerah Kabupaten/Kota	
			RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	43,75%	100 %	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	34,97%	78,1 Ha	Keg. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Kapasitas Penyediaan Air Baku	23,16%	55 %	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPRKP
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	88,84%	45,20 %	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	DPRKP
			Wilayah Bebas Blankspot	91 %			

Provinsi					DAERAH		
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi	Tingkat Kemantapan Jalan	81%	85 %	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Tingkat Aksesbilitas Jalan	43,75 %		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100 %			
			Persentase Sarpras Bangunan & Lingkungannya dalam Kondisi Baik	100 %		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
			Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	30 %		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Persentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	70%		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Dinas Perhubungan

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						Daerah Kabupaten/Kota	
			Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2,60 %		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	54,43 %			
		Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang %	82 %	78,32 %	Program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPR
			Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	40%	20 %	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Persentase Luas Sisa Areal Hpl Yang Dapat Dikembangkan Oleh Pemda	40%			
4	Meningkatkan Tata Kelola	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	73,24 indeks	72,50	Program Administrasi Umum (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		**Sub Prioritas**	**Indikator Sasaran**	**Target**	**Target Daerah**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah**	**OPD PENANGGUNG JAWAB**
	Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik					Kabupaten/Kota)	
			Opini BPK	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
			Nilai Sakip	A	BB	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Indeks Profesionalitas ASN	75 indeks	69,91	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKD Diklat
		Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks RB	89,04 indeks			
			APE Gender	76,33 indeks		Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	DP3A
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25 indeks	3,20	Program Aplikasi Informatika	Diskominfotik

Kasubag. Pemadangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Provinsi					DAERAH		
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pelayanan Publik					
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9 indeks	61,77	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Tutupan Lahan	52,64 indeks			
			Indeks Kualitas Air	56,04 indeks	57,80	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	88,65 indeks	79,99	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Air Laut	69,86 indeks			
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22,20 %			
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca	pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100 %		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Bencana	penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100%		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
			persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	33,30%			
			persentase Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,20 %			
6	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate	Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:				
			- Padi	1.544.873 Ton			
			- Bawang	504 Ton			
			- Cabe rawit	17.216 Ton			

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
			- Cabe Besar	13.951 Ton			
			- Jeruk	121.055 Ton			
			- Produksi daging	128.749 Ton			
			- Produksi ikan tangkap	211.000 Ton	10.004 ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP3
			- Produksi ikan budidaya	167.419 Ton	10 Ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP3
			- Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	75 skor			
			- Stok MInimal Cadangan PanganPemerintah (CPP) Provinsi	420 ton		Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	DKP3
			- Lumbung Pangan	181 buah			
		Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN	Tingkat Kemantapan Jalan	81 %	85 %	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
			Tingkat Aksesbilitas Jalan	43,75 %		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Provinsi				DAERAH			
PRIORITAS/SUB PRIORITAS		Sub Prioritas	Indikator Sasaran	Target	Target Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Daerah	OPD PENANGGUNG JAWAB
						Kabupaten/Kota	
			% Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100 %			

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2023

Prioritas Pembangunan tahun 2023 pada dasarnya adalah Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi dan RKP, tema pembangunan tahun 2023 yang diangkat yaitu **"Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat"**. Maka dalam penyusunan RKPD 2023 perlu memperhatikan :

1. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan tahun 2022 dan tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2021-2026;
2. Identifikasi isu strategis dan kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan (RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023); dan
3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin di selaraskan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah Tahun 2021-2026,dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.11
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024

- Misi 1: Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan
- Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Misi 3: Menguatkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat
- Misi 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan
- Misi 5: Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat
- Misi 6: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

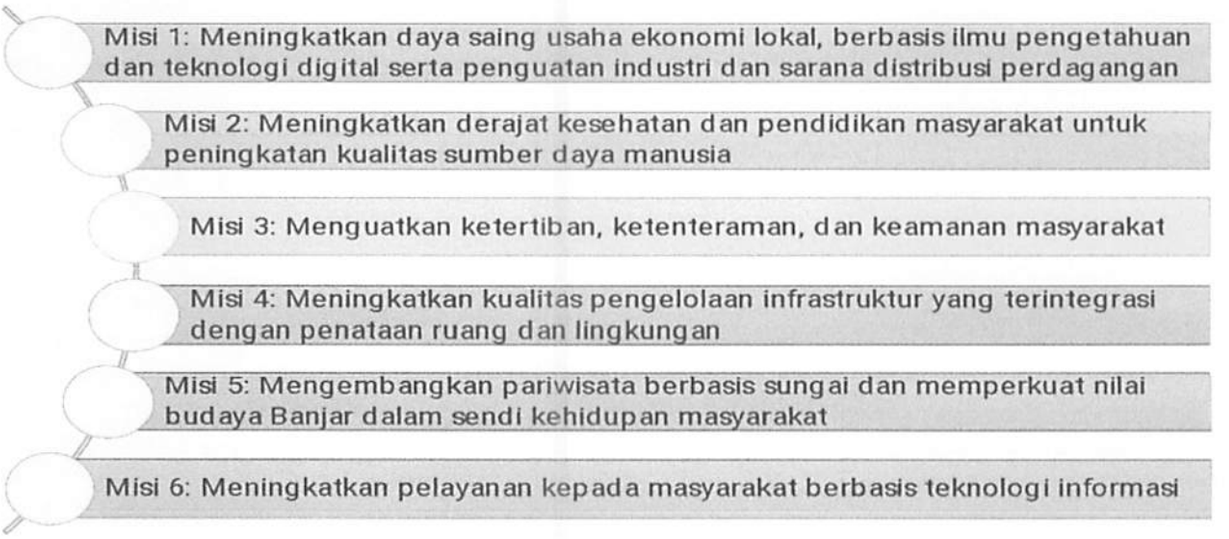

Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat

Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Berdasarkan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024 tersebut diatas yang dilatarbelakangi permasalahan pembangunan dan diperkuat dengan penyusunan Sub Prioritas untuk memperkuat fokus pembangunan yang hendak di capai melalui pengendalian Program (delivery mechanism) dalam dokumen Renja SKPD Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Gambar 4.12

Prioritas Program Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023

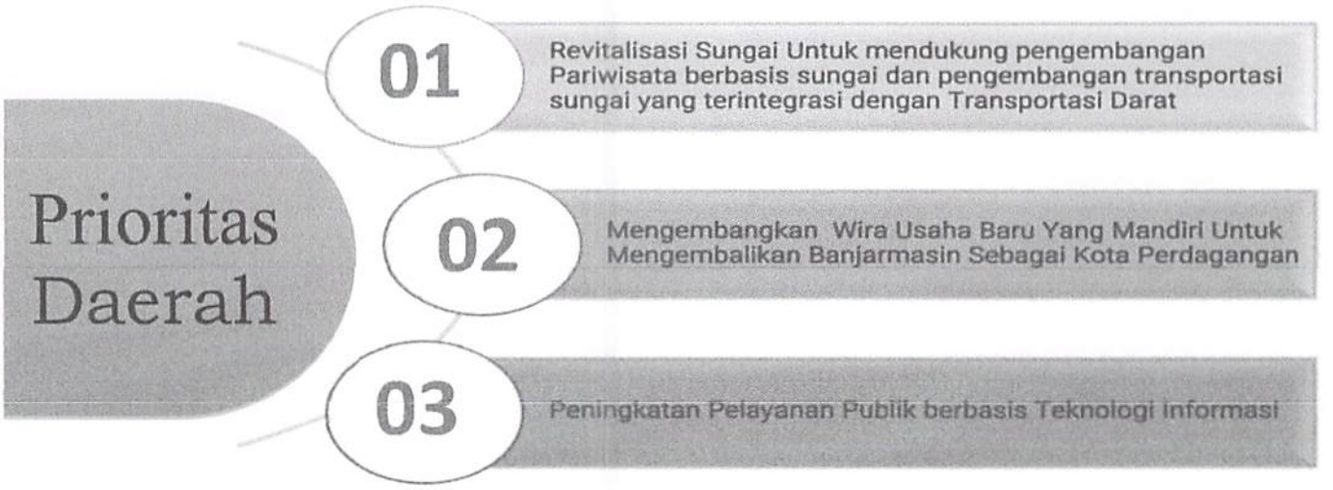

Selanjutnya, 3 (tiga) kelompok prioritas program pembangunan tersebut dituangkan secara detail ke dalam 20 (dua puluh) agenda prioritas agar lebih memfokuskan dalam pencapaian dan kebermanfaatan pelaksanaan program dan kegiatan ke masyarakat kota banjarmasin diantaranya sebagai berikut :

Tabel. 4.12
Arah Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin

Misi	Prioritas Pembangunan	Tujuan			
		1	2	3	4
Misi 1: Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal,	Pengembangan ekonomi kreatif				
	Melanjutkan pembangunan sarana prasarana sebagai pusat/galeri produk lokal dan				

Misi	Prioritas Pembangunan	Tujuan			
		1	2	3	4
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan	rumah kemasan				
	Melanjutkan penataan pasar tradisional dan pusat distribusi regional				
	Melanjutkan pengembangan kewirausahaan dengan penciptaan wirausaha baru dan peningkatan digitalisasi UMKM				
	Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penguatan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil				
	Pengembangan kawasan industri Mantuil bekerjasama dengan investor dan pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin				
Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia	Melanjutkan pengembangan Rumah Sakit Sultan Suriansyah				
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pondok Pesantren				
	Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa ke Yaman dan Timur Tengah				
Misi 3: Menguatkan ketertiban, ketenteraman, dan	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi antar kota, antar provinsi dan antar negara (*sister*				

Misi	Prioritas Pembangunan	Tujuan			
		1	2	3	4
keamanan masyarakat	*city*)				
Misi 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan	Melanjutkan pembangunan trotoar pada ruas-ruas jalan utama Kota Banjarmasin				
	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang untuk mendukung pengembangan wisata dan transportasi sungai				
	Mengintegrasikan transportasi sungai dan transportasi darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga tanpa terkecuali				
	Melanjutkan pembangunan pusat daur ulang sampah				
	Melanjutkan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan penataan destinasi wisata berbasis sungai dan budaya lokal				
	Pengembangan ruang terbuka publik ramah anak, ramah lansia, dan ramah disabilitas di tiap kecamatan				
Misi 5: Mengembangkan	Pembangunan Museum Banjarmasin				

Misi	Prioritas Pembangunan	Tujuan			
		1	2	3	4
pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat	Festival Budaya Banjar berskala nasional dan internasional				
Misi 6: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi	Pengembangan *smart city* dan teknologi digital untuk pelayanan publik serta pemasaran produk				
	Pembangunan *city center* berupa Mall Pelayanan Publik				

Keterangan: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) memajukan daerah; (3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (4) menyelesaikan persoalan daerah

Berdasarkan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024, Prioritas Program Daerah dan Arah Prioritas Pembangunan tersebut diatas yang maka prioritas daerah dalam rangka pewujudan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat di Kota Banjarmasinpada Tahun 2023 yakni sebagai berikut :

1.2.2.1. Misi 1: Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan

Pada tahun 2023, tujuan yang akan diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi Pertama yakni sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sector dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut :

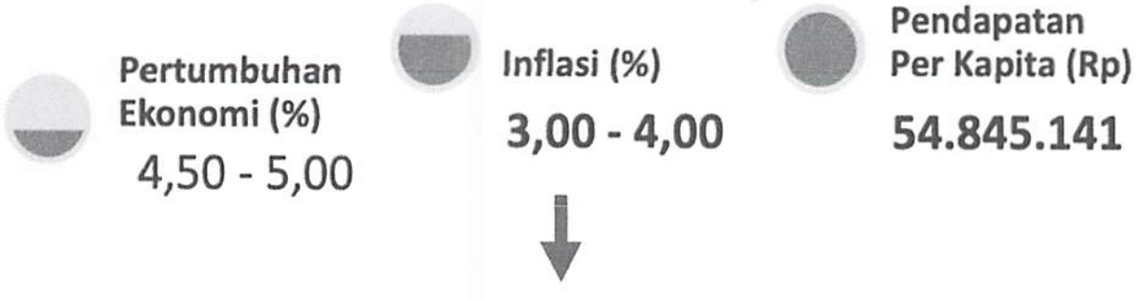

Tabel. 4.13
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 1 Tujuan 1
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (%)	4,50
2	Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	3,50
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Harga Konsumen (nilai)	123,28
4	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pertumbuhan nilai investasi (%)	2,00

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

Kabag. Perekonomian | Kabag. Hukum | Sekda SKPD

Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut

Indeks Gini (ketimpangan pendapatan) (nilai)

0,310

Tabel. 4.14
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 1 Tujuan 2
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Menurunnya penduduk miskin perkotaan	Angka kemiskinan (%)	4,35
2	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	63,46
		Angka pengangguran (%)	6,21-8,44
		Pertumbuhan wirausaha baru yang mandiri (%)	7,50

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

1.2.2.2. Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia

Pada tahun 2023, tujuan yang akan diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi Kedua yakni sebagai berikut :

Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut

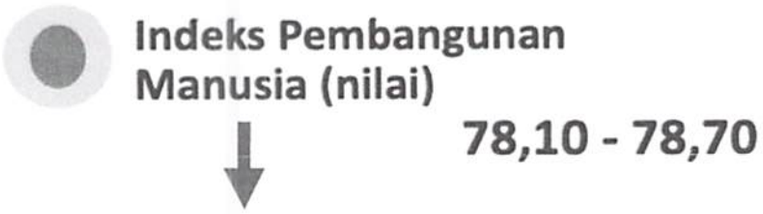

Tabel. 4.15
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 2 Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,98-9,99
		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,95-13,97
		Angka Harapan Hidup (tahun)	71,25-71,35
		Angka stunting (%)	21,35

Tahun 2023

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

1.2.2.3. Misi 3: Menguatkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat

Pada tahun 2023, tujuan yang akan diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi Ketiga yakni sebagai berikut :

Tujuan 4: Terwujudnya Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram, dan aman

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Terwujudnya Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram, dan aman dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tabel. 4.16
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 3 Tujuan 4
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Optimalnya penegakan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada (%)	5,00
		Cakupan layanan risiko bencana (%)	100

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

1.2.2.4. Misi 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan

Pada tahun 2023, tujuan yang akan diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi Keempat yakni sebagai berikut :

Tujuan 5: Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut:

Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Sepala SKPD

Tabel. 4.17
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 4 Tujuan 5
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	Cakupan layanan infrastruktur dan lingkungan (%)	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,77

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

1.2.2.5. Misi 5: Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat

Pada tahun 2023, tujuan yang akan diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi Kelima yakni sebagai berikut :

Tujuan 6: Meningkatkan daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis sungai

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Meningkatkan daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis sungai dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut :

Kabag. Hukum

Pertumbuhan sektor pariwisata dalam PDRB (%)

7,93

Tabel. 4.18
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 5 Tujuan 6
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	26,00
		Persentase seni budaya Banjar yang dilestarikan (%)	100

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

1.2.2.6. Misi 6: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

Pada tahun 2023, tujuan yang akan diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi Keenam yakni sebagai berikut :

Tujuan 7: Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani

Dalam kerangka untuk mewujudkan Tujuan Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani dengan indikator yang akan dicapai beserta sasaran yang mendukung yakni sebagai berikut :

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Asisten SKPD

Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)

72,50 (BB)

Tabel. 4.19
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target di Misi 6 Tujuan 7
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK (kategori)	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (nilai dan kategori)	75,00 (BB)
		Indeks Profesionalitas ASN (nilai)	69,91 (rendah)
2	Optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai dan kategori)	87,85 (sangat baik)
		Indeks Smart City (nilai)	2,95
		Indeks SPBE (nilai)	3,20 (baik)

Sumber : RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026

Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tabel 4.20

Sinergisitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan Prioritas Daerah Kota Banjarmasin

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
PRIORITAS DAERAH 1					
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Digital Serta Penguatan Industri Dan Sarana Distribusi Perdagangan					
Tujuan 1: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor	Sasaran 1: Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (%)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 7,720,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Program Pengembangan Ekspor	Rp 151,500,000	
			Program Penggunaan dan Pemasaraan Produk Dalam Negeri	Rp 240,000,000	
	Sasaran 2: Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 2,627,500,000	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 303,500,000	
	Sasaran 3: Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Harga Konsumen (nilai)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 150,000,000	

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 530,000,000	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 375,000,000	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 865,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 995,000,000	
		Pertumbuhan nilai investasi (%)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 55,000,000	
	Sasaran 4: Meningkatnya daya saing investasi daerah		Program Promosi Penanaman Modal	Rp 172,560,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 200,000,000	
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan	Sasaran 5: Menurunnya penduduk miskin perkotaan	Angka kemiskinan (%)	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1,033,195,000	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2,808,768,000	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 7,152,000,000	
	Sasaran 6: Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 213,664,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1,164,574,000	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 512,654,000	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1,830,843,875	
			Program Pengembangan UMKM	Rp 1,071,503,400	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 3,373,591,100	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 685,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 175,000,000	
Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia					
Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	Sasaran 7: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 175,400,704,856	Dinas Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 50,000,000	
		Angka Harapan Hidup (tahun)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp 230,000,000	
		Angka *stunting* (%)	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1,353,913,776	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 182,367,689,771	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 11,058,275,000	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 625,183,332	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 5,647,280,000	
			Program Pengendalian Penduduk	Rp 126,992,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 1,574,563,000	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 2,885,141,600	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 26,852,304,978	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Misi 3: Menguatkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat					
Tujuan 4: Terwujudnya Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram, dan aman	Sasaran 8: Optimalnya penegakan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada (%)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 11,706,874,000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Perlindungan Perempuan	Rp 300,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

VISI/MISi/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 239,500,000	Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 275,000,000	
		Cakupan layanan risiko bencana (%)	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1,900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 2,759,974,900	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Program Penanganan Bencana	Rp 980,000,000	Dinas Sosial
Misi 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan					
Tujuan 5: Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan	Sasaran 9: Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	Cakupan layanan infrastruktur dan lingkungan (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 16,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 100,000,000	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
lingkungan			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 6,480,833,000	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 5,629,006,000	
			Program Pengembangan Permukiman	Rp 1,550,000,000	
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 4,318,000,000	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 96,686,438,000	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 3,087,861,000	
			Program Pengembangan Perumahan	Rp 13,368,821,150	
			Program Kawasan Permukiman	Rp 12,635,200,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 6,210,000,000	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 60,091,588,039	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 18,400,000,000	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 66,865,232,760	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 3,147,330,390	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 13,267,572,000	
Misi 5: Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat					
Tujuan 6: Meningkatkan daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis sungai	Sasaran 10: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 4,216,592,170	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Rp 1,707,508,980	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1,415,679,240	

VISI/MISi/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
		Persentase seni budaya Banjar yang dilestarikan (%)	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 2,800,000,000	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 1,214,200,030	
			Program Pengelolaan Permuseuman	Rp 597,500,000	
Misi 6: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi					
Tujuan 7: Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani	Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK (kategori)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 14,492,586,060	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2,249,851,767	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4,840,402,498	
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (nilai dan kategori)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1,222,586,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 660,385,000	

Kasubbag. Perencanaan	Kasbag. Hukum	Kepala SKPD

VISI/MISi/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 2,355,000,000	Inspektorat Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1,498,560,750	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 474,844,163	
			Program Administrasi Umum (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)		Sekretariat Daerah
		Indeks Profesionalitas ASN (nilai)	Program Kepegawaian Daerah	Rp 8,477,035,800	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 3,732,414,000	
	Sasaran 12: Optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai dan kategori)	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 1,504,435,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Rp 471,016,000	

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

VISI/MISi/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	SKPD
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 498,666,000	
		Indeks Smart City (nilai)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 4,052,291,534	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
		Indeks SPBE (nilai)	Program Aplikasi Informatika	Rp 8,580,458,484	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

4.3 Keselarasan Tujuan, Sasaran Beserta Indikator RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2023

Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs/TPB untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia sebagai bagian dari komunitas internasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya difokuskan Kembali kedalam Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yakni dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 juga telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin juga mengacu pada RPJMN dan TPB sebagai tolok ukur pencapaian kesejahteraan. Visi dan misi serta program dan kegiatan pembangunan Kota Banjarmasin yang tertuang dalam RPJMD selaras dengan komitmen TPB yang memiliki tujuan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan. Adapun integrasi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banjarmasin beserta indikatornya dengan tujuan, target, dan indikator TPB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21

Integrasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banjarmasin beserta Indikator dengan Tujuan, Target dan Indikator SDGs / TPB

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
Tujuan 1: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal lintas sektor	Sasaran 1: Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (%)	Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pembangunan Ekonomi
			Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan	17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Pembangunan Ekonomi
	Sasaran 2: Meningkatnya pengembangan dan daya saing industri pengolahan berbasis potensi daerah	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pembangunan Ekonomi
			Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Pembangunan Ekonomi

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				proporsinya di negara kurang berkembang		
			Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan	17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Pembangunan Ekonomi
	Sasaran 3: Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Harga Konsumen (nilai)	Tujuan 2: Tanpa kelaparan	2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1* Indikator anomali harga pangan	Pembangunan Sosial
	Sasaran 4: Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pertumbuhan nilai investasi (%)	Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	Pembangunan Ekonomi
					17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema	

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Arpus SKPD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	
					17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi	
				17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan	17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi	Pembangunan Ekonomi
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan	Sasaran 5: Menurunnya penduduk miskin perkotaan	Angka kemiskinan (%)	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari	1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim	Pembangunan Sosial
				1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Pembangunan Sosial

Asisten Perekonomian | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan				di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umu	
					1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	
			Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Pembangunan Ekonomi
			Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan	17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan	17.13.1* Tersedianya Dashboard	Pembangunan Ekonomi

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala BAPPEDA

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
			berkelanjutan		Makroekonomi	
	Sasaran 6: Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET	Pembangunan Ekonomi
		Angka pengangguran (%)		8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Pembangunan Ekonomi
					8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	
		Pertumbuhan wirausaha baru yang mandiri (%)	Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Pembangunan Ekonomi

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization	8.b.1 Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	Pembangunan Ekonomi
Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	Sasaran 7: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Pembangunan Sosial
			Tujuan 4: Pendidikan berkualitas	Multi target pada Tujuan 4	Multi indikator pada Tujuan 4	Pembangunan Sosial

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Pembangunan Sosial
			Tujuan 4: Pendidikan berkualitas	Multi target pada Tujuan 4	Multi indikator pada Tujuan 4	Pembangunan Sosial
		Angka Harapan Hidup (tahun)	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Pembangunan Sosial
					1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	
				1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak	1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan	Pembangunan Sosial

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	akses terhadap pelayanan dasar	
			Tujuan 2: Tanpa kelaparan	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Pembangunan Sosial
			Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera	Multi target pada Tujuan 3	Multi indikator pada Tujuan 3	Pembangunan Sosial
		Angka *stunting* (%)	Tujuan 2: Tanpa kelaparan	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Pembangunan Sosial
Tujuan 4: Terwujudnya	Sasaran 8: Optimalnya	Tingkat pelanggaran	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya	1.4.1* Proporsi penduduk/rumah	Pembangunan Sosial

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
Kota Banjarmasin yang tertib, tenteram, dan aman	penegakan hukum dan meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Perda dan Perkada (%)		masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	
			Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Pembangunan Sosial
					5.2.2 (a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	
				5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum	

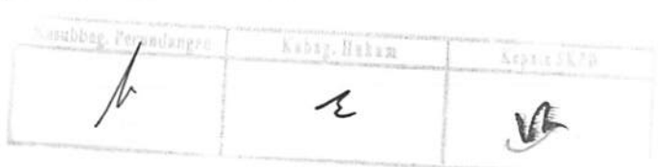

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					umur 18 tahun.	
			Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.2 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Pembangunan Lingkungan
					11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	
			Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun	Multi Indikator pada Target 16.1	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
		Cakupan layanan risiko bencana (%)	Tujuan 1: Tanpa kemiskinan	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi,	1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap	Pembangunan Sosial

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	pelayanan dasar	
			Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan	**1.5** Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana **1.6**	Multi Indikator Target 15.1	Pembangunan Sosial
			Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan	Multi Indikator Target 11.5	Pembangunan Lingkungan
				11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang	11.b.1* Rencana dan implementasi	Pembangunan

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030	strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Lingkungan
					11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	
			Tujuan 13: Penanganan perubahan iklim	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	Multi Indikator Target 13.1	Pembangunan Lingkungan
Tujuan 5:	Sasaran 9:	Cakupan	Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi	Multi Target pada Tujuan 6	Multi Indikator	Pembangunan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang mantap, tangguh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif dan optimalisasi lingkungan yang berkelanjutan	layanan infrastruktur dan lingkungan (%)	layak		pada Tujuan 6	Lingkungan
			Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semu	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional	Pembangunan Ekonomi
					9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	
					9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan	
				9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing- masing	Multi Indikator Target 9.4	
			Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan	11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah	Pembangunan Lingkungan

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				kumuh	kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	
					11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	
				11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua	Multi Indikator Target 11.2	
				11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	11.4.1 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)	
					11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	
				11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	Multi Indikator Target 11.6	
			Tujuan 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus	Multi Indikator Target 12.4	Pembangunan Lingkungan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan		
				12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.5.1 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang	
					12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	
				12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	Multi Indikator Target 12.7	
			Tujuan 13: Penanganan perubahan iklim	13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional	Multi Indikator Target 13.2	Pembangunan Lingkungan
				13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim	13.3.1 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan	Pembangunan Lingkungan

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa	
					13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	
			Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama	17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	Pembangunan Ekonomi
					17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk	

Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala KPP

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	
					17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak	6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku	Pembangunan Lingkungan
					6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku	
			Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi	11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara	Pembangunan Lingkungan

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala Biro

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
				perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota		
Tujuan 6: Meningkatkan daya dukung dan daya tarik pariwisata berbasis sungai	Sasaran 10: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah berbasis sungai dan pelestarian budaya Banjar	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pembangunan Ekonomi
		Persentase seni budaya Banjar yang dilestarikan (%)	Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Pembangunan Ekonomi
			Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	11.4.1 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)	Pembangunan Lingkungan

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala BKPP

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	
			Tujuan 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal	12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Pembangunan Lingkungan
Tujuan 7: Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan birokrasi yang bersih dan melayani	Sasaran 11: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK (kategori)	Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala BAPPEDA

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
		daerah (nilai dan kategori)			SAKIP ≥ B	
		Indeks Profesionalitas ASN (nilai)	Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
	Sasaran 12: Optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai dan kategori)	Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
		Indeks Smart City (nilai)	Multi Tujuan	Multi Target pada beberapa tujuan	Multi Indikator pada beberapa tujuan	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Sosial; Pembangunan Lingkungan
		Indeks SPBE (nilai)	Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan	Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Target	Indikator TPB	Pilar
					pelayanan publik kategori baik.	

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

Hali Ini juga ditekankan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Secara Umum Pokir DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2023 adalah tersirat harapan dari masyarakat Kota Banjarmasin untuk mendapatkan perbaikan terhadap Pelayanan Infrastuktur, perhatian terhadap kualitas sungai dan penyediaan sarana pembuangan Limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri serta kiriman "benda" asing dari hulu sungai martapura dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada turut menjadi masukan yang dominan oleh masyarakat serta pelayanan publik turut menjadi hal yang perlu ditingkatkan dalam hal perbaikan sarpras dan penyediaan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga serta berkumpul dengan keluarga. Berikut daftar usulan Pokir DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2023 :

Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Tabel 4.22
Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2023

No	Partai	Jumlah Usulan	Ket
1.	Fraksi Partai Gerindra	28 Usulan Kegiatan	
2.	Fraksi Golkar	55 Usulan Kegiatan	
3.	Fraksi Pan	73 Usulan Kegiatan	
4.	Fraksi Pdip	95 Usulan Kegiatan	
5.	Fraksi Partai Demokrat	59 Usulan Kegiatan	
6.	Fraksi Pks	65 Usulan Kegiatan	
7.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	40 Usulan Kegiatan	
8.	Fraksi Restorasi Bintang Persatuan (Partai Bulan Bintang, Nasdem Dan Partai Persatuan Pembangunan)	24 Usulan Kegiatan	

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala sKPD

Tabel 4.23
Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Misi RPJMD/Prioritas Daerah

MISI RPJMD/PRIORITAS DAERAH	USULAN POKIR	KETERANGAN
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal, Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Digital Serta Penguatan Industri Dan Sarana Distribusi Perdagangan		
Nyaman Bausaha "WUB"	4 Usulan	
Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia		
Nyaman Berobat "Kesehatan"	14 Usulan	
Nyaman Sekolah "Pendidikan"	16 Usulan	
Misi 3: Menguatkan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat		
Barasih Sampai Ka Hati	14 Usulan	
Misi 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan		
Barasih Jalan Infrastruktur	346 Usulan	
Barasih Lingkungan	12 Usulan	
Barasih Sungainya	26 Usulan	
Misi 6: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi		
Nyaman Baurusan "Pelayanan, Perijinan & Birokrasi	7 Usulan	
Jumlah	**439 USULAN POKIR**	

Kabag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini secara eksplisit menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatakan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Program dan kegiatan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kumpulan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan rekapitulasi usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Kota Banjarmasin TA 2023.

Perumusan Program dan Kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan kedudukan tahun ke-2 RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

Prioritas RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-2 RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, dengan Tema pembangunan adalah "Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat untuk Penguatan Ekonomi ".

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

Fokus prioritas Daerah pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin ditetapkan dalam rangka upaya mencapai target-target sasaran pembangunan dalam RPJMD dengan memprioritaskan 5 Prioritas Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Prioritas Daerah	Program	Nama Kegiatan Prioritas	Alokasi Pagu
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	2.000.000.000,-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sultan Suriansyah	3.000.00.000,-
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat	3.003.071.744,-
Meningkatkan Perekonomian Melalui Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Event ICCF dalam rangka percepatan pencapaian indikator makro	1.365.950.000,-
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembebasan Lahan Makam Sultan Suriansyah	11.000.000.000,-
Penguatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Penanganan risiko sosial dan kegiatan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	765.360.000,-
Memperkuat Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	NuFrep	30.000.000.000,-

Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

Prioritas Daerah	Program	Nama Kegiatan Prioritas	Alokasi Pagu
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jembatan di Kawasan Alalak, Komplek Rahayu, Sungai Jingah, dan Mantuil	10.000.000.000,-
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Mandatory Spanding urusan pengawasan	1.851.806.299
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pelatihan Pengelolaan Data Kelurahan	20.000.000,-

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung langsung terhadap capaian target Kota Banjarmasin pada tahun 2023 dari hasil usulan SKPD berdasarkan masing-masing urusan sebagai berikut :

a. Urusan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Pendidikan	588,733,086,266
2	Kesehatan	434,036,885,968
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	269,706,563,024
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	77,514,586,405
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	46,019,769,738
6	Sosial	25,831,472,805
Total Kerangka Pendanaan		**1,441,842,364,206**

Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Tenaga Kerja	2,075,558,800
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,816,960,487
3	Pangan	14,384,243,657
4	Pertanahan	685,000,000
5	Lingkungan Hidup	171,483,579,766
6	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11,394,640,353
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,241,390,400
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17,560,739,573
9	Perhubungan	110,987,111,457
10	Komunikasi dan Informatika	23,617,376,264
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17,951,034,212
12	Penanaman Modal	15,214,582,004
13	Kepemudaan dan Olahraga	39,211,785,300
14	Statistik	78,718,320
15	Persandian	614,796,520
16	Kebudayaan	19,861,216,289
17	Perpustakaan	1,234,840,860
18	Kearsipan	8,203,292,170
Total Kerangka Pendanaan		**471,616,866,432**

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

c. Urusan Pilihan

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Kelautan dan Perikanan	1,065,590,680
2	Pariwisata	11,653,924,480
3	Pertanian	10,374,328,250
4	Perdagangan	23,199,243,846
5	Perindustrian	5,982,753,614
Total Kerangka Pendanaan		**52,275,840,870**

d. Urusan Pendukung

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Sekretariat Daerah	131,522,387,399
2	Sekretariat DPRD	110,116,655,657
Total Kerangka Pendanaan		**241,639,043,056**

e. Urusan Penunjang Pemerintah Daerah

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Perencanaan	13,039,647,114
2	Keuangan	73,768,722,334
3	Kepegawaian	17,563,429,623
4	Pendidikan dan Pelatihan	4,961,885,800
5	Penelitian dan Pengembangan	2,868,657,100
Total Kerangka Pendanaan		**112,202,341,971**

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

f. Unsur Pengawas

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Inspektorat Daerah	15,611,916,699
Total Kerangka Pendanaan		**15,611,916,699**

g. Unsur Kewilayahan

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Kecamatan	107,276,804,504
Total Kerangka Pendanaan		**107,276,804,504**

h. Unsur Pemerintahan Umum

No	Urusan	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 Penjabaran Usulan
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	31,238,939,516
Total Kerangka Pendanaan		**31,238,939,516**

...g. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kota Banjarmasin memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rancangan Akhir Renja SKPD.

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin adalah melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Banjarmasin dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsif efesiensi, efektifitas, dan akuntabel serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD